



# **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

**SPK dan Surat Perjanjian**

**NOMOR : 01/SEK.03/W5.TUN5/HK1.3/2024 ✕**

**TANGGAL: 31 DESEMBER 2021 ✕**

**PAKET PEKERJAAN :**

**PELAYANAN POS BANTUAN HUKUM  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
PANGKALPINANG**

**PELAKSANA :**

***PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL  
JUSTICE BANGKA BELITUNG (LEGAL JUSTICE)***

***Jl. Betutu, Kelurahan Selindung Baru, kecamatan  
Gabek***

***PANGKALPINANG***

**TAHUN ANGGARAN 2024**



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

JALAN PULAU BANGKA, KOMPLEK PERKANTORAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 33684

Telepon : 0717 – 9111513, Email: pangkalpinang@ptun.org

Website: ptun-pangkalpinang.go.id

## SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor: 01/SEK.03/W5-TUN.5/HK1.3/II/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02/01/2024) yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si.  
NIP : 19850207 200604 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang  
Alamat : Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi, Kelurahan Air Itam  
Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang selanjutnya disebut dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : APRI ANGGARA, S.H.  
Jabatan : Ketua Umum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum legal Justice Bangka  
Belitung (Legal Justice)  
Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Betutu, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota  
Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum legal Justice Bangka Belitung (Legal Justice), yang selanjutnya dalam perjanjian disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA memberikan perintah kerja kepada PIHAK KEDUA Pekerjaan Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum melaksanakan pelayanan pada POSBAKUM sejak tanggal ditanda tangani Surat Perintah Kerja ini.
2. Biaya pelaksanaan tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan Nomor: SP-DIPA-005.05-2.403429/2024, tanggal 24 November 2023.

3. Apabila PIHAK KEDUA lalai atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati maka pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat menarik mandat, dapat mengganti Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum legal Justice Bangka Belitung (Legal Justice) dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum yang lain.
4. Pembayaran Pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dapat dibayarkan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak perjanjian melalui rekening **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** atas nama **PLBH LEGAL JUSTICE BABEL** dengan Nomor rekening: **0063-01-027596-53-3** dan Nomor NPWP: **40.739.546.6-304.000**
5. Hal-hal yang belum jelas dan belum dicantumkan, serta perubahan-perubahan pada SPK ini dapat ditambah dengan kesepakatan kedua belah pihak.
6. Pemberian pelayanan bantuan hukum di POSBAKUM diberikan dalam jumlah, yaitu minimal 288 jam layanan setahun.
7. Kelebihan jam pelayanan tidak dibayar.

Demikian surat perintah kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai.

#### PIHAK KEDUA

Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum legal Justice  
Bangka Belitung (Legal Justice)



**APRI ANGGARA, S.H.**  
Ketua Umum

#### PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen



**MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si.**  
NIP. 19850207 200604 1 001

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG DENGAN**  
**LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM**  
**PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICE BANGKA**  
**BELITUNG (LEGAL JUSTICE)**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Pada hari ini, Selasa tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama **MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si.**, Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang berkedudukan di Jalan Pulau Bangka, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. Nama **APRI ANGGARA, S.H.** Jabatan Ketua Umum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (Legal Justice), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (Legal Justice), yang berkedudukan di Jl. Betutu, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bagi pemberi

bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk:

- a. Pemberian informasi, konsultasi hukum, atau advis hukum;
  - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
  - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
2. Petugas Pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
  3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
  4. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN PRINSIP**

#### **Pasal 2**

- 1) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya.
- 2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud (1) didasarkan pada prinsip – prinsip:
  - a. Keadilan;

- b. Sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Transparansi;
- e. Akuntabilitas;
- f. Efektifitas dan Efisiensi;
- g. Bertanggung jawab dan;
- h. Profesional;

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

- 1) Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang :
- 2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Layanan Bantuan Hukum yang meliputi:
  - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
  - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibuthkan;
  - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
- 3) Pengaturan dan daftar Pemberi Layanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

### **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 4**

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja dan kursi;
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK

PERTAMA;

- b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
3. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Hari dan jam pelayanan adalah pada Hari Selasa, Rabu dan Kamis pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB;
  - b. Kelebihan jam pelayanan tidak dibayar;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali.
5. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa:
  - 1) Teguran Lisan;
  - 2) Teguran Tertulis;
  - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;

## **Pasal 5**

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;
- b. Melaksanakan pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
- c. Memerintahkan Petugas Pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
- d. Menentukan jumlah Petugas Pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
- e. Membuat daftar Petugas Pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para Pemberi Bantuan Hukum, serta rnengajukannnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Pangkalpinang.
- f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;
- g. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya

kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

- h. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;

## **BAB V**

### **MASA BERLAKU**

#### **Pasal 6**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuranukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **BAB VI**

### **KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 7**

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Advokat;
- b. Memiliki pengalaman dalam menanagi perkara dan/atau beracara di pengadilan;
- c. Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum;
- d. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

## **BAB VII**

### **MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN**

#### **Pasal 8**

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan

- tidak mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;
3. Pemberi layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari;
    - a. Formulir permohonan;
    - b. Dokumen persyaratan tidak mampu;
    - c. Dokumen hukum yang telah dibuat Posbakum Pengadilan;
    - d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
  4. Apabila penerima layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;
  5. Apabila penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

## **BAB VIII**

### **INDIKATOR KINERJA**

#### **Pasal 9**

Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang setiap bulannya;

## **BAB IX**

### **KODE ETIK**

#### **Pasal 10**

1. Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:
  - a. Petugas Pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada pihak Penggugat dan tergugat Interveniend dalam perkara yang sama;
  - b. Petugas Pemberi bantuan hukum dalam menjalankan, tugasnya harus bersikap sopan

- dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
- c. Petugas Pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
  - d. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan/tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan hukum;
  - e. Petugas Pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;
  - f. Petugas Pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
  - g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan;
  - h. Petugas pemberi layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
  - i. Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatas- namakan dirunya sebagai bagian/petugas Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
2. Hubungan antara petugas pemberi layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
  3. Petugas Pemberi Layanan Posbakum haru memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggungjawab;
  4. Petugas Pemberi Layanan Posbakum bertanggungjawab untuk memberikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

**BAB X**  
**KOORDINASI**  
**Pasal 11**

- 1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin ;

- 2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat bekoordinasi dengan pars pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;

## **BAB XI**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 12**

- 1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- 2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap perjanjian Kerjasama ini;

## **BAB XII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

- 1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 Nomor SP.DIPA-005.05.2.403429/2021 tanggal 17 November 2021;
- 2) Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- 3) Pembayaran imbalan jasa kepada Pemberi Layanan Bantuan Hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap awal bulan berikutnya;

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 14**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
- 3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

**BAB XIV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 15**

- 1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

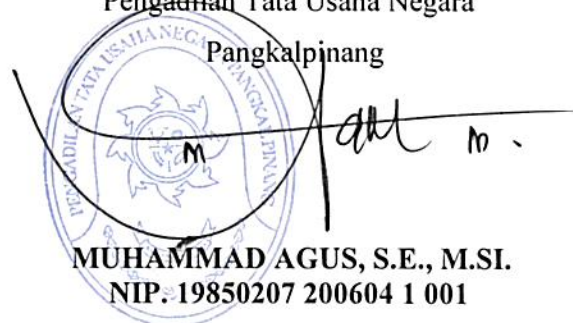
**PIHAK KEDUA**

Ketua,  
Perkumpulan LBH Legal Justice  
Bangka Belitung



**PIHAK PERTAMA**

Pejabat Pembuat Komitmen,  
Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pangkalpinang





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang  
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

**LEMBAR DISPOSISI**

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
| <b>PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai Naskah Dinas pun yang tergabung dalam berkas ini</b>  |                                |  |
| Nomor Naskah Dinas :<br>Tanggal Naskah Dinas :<br>Lampiran :   | Status :<br>Sifat :<br>Jenis : | Diterima Tanggal :<br>Nomor Agenda :   |
| Dari :<br>Hal :  |                                |  |
| <input type="checkbox"/> SANGAT SEGERA   |                                | <input type="checkbox"/> SEGERA  |
| <b>DISPOSISI KEPADA :</b><br><input type="checkbox"/> Wakil Ketua<br><input type="checkbox"/> Hakim<br><input type="checkbox"/> Panitera<br><input type="checkbox"/> Sekretaris<br><input type="checkbox"/> Panmud Perkara<br><input type="checkbox"/> Panmud Hukum<br><input checked="" type="checkbox"/> Kasub Umum & Keuangan<br><input checked="" type="checkbox"/> Kasub Kepegawaian & Ortala<br><input checked="" type="checkbox"/> Kasub PTIP |                                | <b>PETUNJUK :</b><br><input type="checkbox"/> Setuju sesuai ketentuan yang berlaku<br><input type="checkbox"/> Tolak sesuai ketentuan yang berlaku<br><input type="checkbox"/> Selesaikan sesuai ketentuan yang berlaku<br><input type="checkbox"/> Jawab sesuai ketentuan yang berlaku<br><input type="checkbox"/> Perbaiki<br><input type="checkbox"/> Teliti & pendapat<br><input type="checkbox"/> Sesuai catatan<br><input type="checkbox"/> Untuk Perhatian<br><input type="checkbox"/> Untuk diketahui<br><input type="checkbox"/> Edarkan<br><input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya<br><input checked="" type="checkbox"/> Bicarakan Bersama dan laporkan hasilnya<br><input type="checkbox"/> Dijadwalkan<br><input type="checkbox"/> Simpan<br><input type="checkbox"/> Disiapkan<br><input type="checkbox"/> Ingatkan<br><input type="checkbox"/> Harap dihadiri/diwakili<br><input type="checkbox"/> Asli kepada ..... |
| Tanggal Kirim untuk Proses :<br>Diterima Oleh :  |                                | Diajukan Kembali Tanggal :<br>Diterima Tanggal :   |
| Tanggal Kembali untuk Proses :<br>Diterima Oleh :  |                                | Tanggal selesai dari Pejabat yang memberi Disposisi :<br><div style="text-align: right; font-family: cursive;">           Lac 29/10/13         </div>  |

- PPK. udion dibacakan spk.  
 - kasub umum udion dibu...  
 MoU keaperta.  
 - PPK udion dibacakan ud...  
 - PPK udion dibacakan Az...





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER**  
**DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684, [www.ptun-pangkalpinang.go.id](http://www.ptun-pangkalpinang.go.id), [info@ptun-pangkalpinang.go.id](mailto:info@ptun-pangkalpinang.go.id)

Pangkalpinang, 29 Desember 2023

Kepada Yth:

KETUA PENGADILAN  
TATA USAHA NEGARA  
PANGKALPINANG

Nomor : 9/Pansel-Posbakum-PTUN.PGP/2023  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Laporan Hasil Kerja Panitia Seleksi  
Lembaga Pemberi Layanan Bantuan  
Hukum Pada Posbakum PTUN  
Pangkalpinang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 692/KPTUN.W5-TUN5/HK1.2.5/XII/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, bersama ini kami laporkan hasil kerja Panitia yang telah dilaksanakan sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 692/KPTUN.W5-TUN5/HK1.2.5/XII/2023 tanggal 14 November 2023, maka Panitia telah melakukan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2023, yang pada pokoknya diperoleh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi, sebagai berikut :
  - 1) Pengumuman dan Pendaftaran Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan mulai tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 15 Desember 2023;
  - 2) Pengumuman Hasil Verifikasi Dokumen, dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023;

- 3) Tes Kualifikasi peserta Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2023, peserta hadir di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 guna dilakukan ujian kompetensi secara tertulis maupun wawancara pada Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai; Materi mengenai ujian kompetensi terkait pengetahuan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara baik Formil maupun Materil, dan Pelayanan Bantuan Hukum kepada pencari keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu;
  - 4) Rapat Panitia untuk menentukan peserta yang lulus seleksi, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, dan Keputusan Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bersifat final;
  - 5) Pengumuman hasil seleksi untuk peserta yang lulus, dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 melalui papan pengumuman, website dan media sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, serta pemberitahuan kepada peserta;
2. Bahwa peserta yang telah mendaftar dan menyerahkan berkas permohonan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mulai tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 15 Desember 2023 sebanyak 4 (empat) peserta, adalah:
- 1) **Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM PANCASILA)**, berkedudukan di Jalan Melati No. 258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang, dalam hal ini diwakili oleh BUDIANA RACHMAWATY, S.H., M.H. selaku Ketua Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM PANCASILA);
  - 2) **Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (LEGAL JUSTICE)**, berkedudukan di Jalan Betutu, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek,

Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh APRI ANGGARA, S.H. selaku Ketua Umum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (LEGAL JUSTICE);

- 3) **Yayasan Hukum Gerbang Keadilan**, berkedudukan di Jalan Solihin GP, No.65, RT.09/RW.03, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh APRI SUNARSI, S.H. selaku Ketua Yayasan Hukum Gerbang Keadilan;
  - 4) **Yayasan Keadilan Untuk Bangsa Indonesia (KUBI)**, berkedudukan di Jalan Sumedang No.147 RT/RW 001/002, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh CAHYA WIGUNA, S.H., CLA., CTL. selaku Direktur Yayasan Keadilan Untuk Bangsa Indonesia (KUBI);
3. Bahwa Panitia telah melakukan verifikasi berkas terhadap 4 (empat) peserta pada tanggal 18 Desember 2023, terhadap peserta dari Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM PANCASILA) dan Yayasan Hukum Gerbang Keadilan, telah melengkapi berkas persyaratan yang diminta Panitia sebagaimana Pengumuman Nomor 2/Pansel-Posbakum-PTUN.PGP/2023 tertanggal 19 Desember 2023, dan hasil dari verifikasi berkas kedua peserta tersebut secara umum sudah memenuhi syarat formal, sedangkan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (LEGAL JUSTICE) sudah dinyatakan dokumen lengkap, namun ada 1 (satu) peserta tidak lolos verifikasi dokumen, adalah **Yayasan Keadilan Untuk Bangsa Indonesia (KUBI)**, berkedudukan di Jalan Sumedang No.147 RT/RW 001/002, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh CAHYA WIGUNA, S.H., CLA., CTL. selaku Direktur Yayasan Keadilan Untuk Bangsa Indonesia (KUBI), secara umum tidak memenuhi syarat administrasi;

4. Bahwa kepada ketiga peserta yang lolos verifikasi dokumen telah dilakukan pemanggilan oleh Panitia melalui email dan surat tertanggal 19 Desember 2023 untuk hadir di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 guna dilakukan ujian kompetensi secara tertulis maupun wawancara;
5. Bahwa selanjutnya Panitia Seleksi telah melaksanakan Tes Kualifikasi secara tes tertulis dan wawancara terhadap peserta yang hadir pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, pukul 09.00 wib sampai dengan selesai, yaitu:
  1. **Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM PANCASILA):**
    - BUDIANA RACHMAWATY, S.H., M.H. selaku Ketua Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM PANCASILA);
    - IVEN KHURNIA, S.H. selaku calon Petugas Posbakum;
  2. **Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (LEGAL JUSTICE):**
    - APRI ANGGARA, S.H. selaku Ketua Umum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (LEGAL JUSTICE);
    - INNEKE LARAS AMBARSARI, S.H. selaku calon Petugas Posbakum;
  3. **Yayasan Hukum Gerbang Keadilan:**
    - FEBRI AGINTA GINTING, S.H., M.H. selaku Anggota Yayasan Hukum Gerbang Keadilan;
    - CHITA ARDAYANI, S.H. selaku calon Petugas Posbakum;
6. Bahwa pada pelaksanaan Tes Kualifikasi tersebut, Panitia juga telah memeriksa dokumen asli persyaratan terhadap 3 (tiga) Lembaga tersebut, dan semua Lembaga telah menunjukkan dokumen asli persyaratan secara lengkap;
7. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, Panitia telah melakukan rapat untuk membahas hasil seleksi, dan dari hasil Tes Kualifikasi berupa tes tertulis dan wawancara yang telah dilaksanakan, maka diperoleh nilai sebagai berikut:

|                      | LPH<br>PANCASILA | Lembaga<br>LEGAL JUSTICE | Yayasan Hukum<br>GERBANG<br>KEADILAN |
|----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Tertulis (Pimpinan)  | 17               | 13                       | 8                                    |
| Tertulis (Petugas)   | 2                | 1                        | 0                                    |
| Wawancara (Pimpinan) | 21               | 23                       | 22                                   |
| Wawancara (Petugas)  | 13               | 21                       | 14                                   |
| <b>NILAI</b>         | <b>53</b>        | <b>54</b>                | <b>44</b>                            |

8. Bahwa dari hasil Tes Kualifikasi tersebut, maka lembaga memperoleh nilai tertinggi pada Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024 adalah: **PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG (LEGAL JUSTICE)**, berkedudukan di Jalan Betutu, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh APRI ANGGARA, S.H. selaku Ketua Umum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (LEGAL JUSTICE);
9. Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat Panitia tanggal 28 Desember 2023 tersebut, Ketua Panitia menetapkan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 7/Pansel-Posbakum-PTUN.PGP/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pemenang Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024 yang menetapkan **PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG (LEGAL JUSTICE)**, berkedudukan di Jalan Betutu, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh APRI ANGGARA, S.H. selaku Ketua Umum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (LEGAL JUSTICE) sebagai Pemenang Seleksi, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2023 Panitia telah mengumumkan perihal tersebut kepada masyarakat melalui papan pengumuman, website dan media sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang serta memberitahukannya kepada peserta yang lulus seleksi;

10. Bahwa dengan terpilihnya lembaga Legal Justice Bangka Belitung sebagai Pemenang Seleksi, maka dengan ini kami merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk menunjuk lembaga tersebut sebagai Lembaga Penyedia Layanan Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024;

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Panitia,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang (PTUN Pangkalpinang). The stamp contains the text "PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

FEBRIANSYAH ROZARIUS  
NIP.19920220112017121003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA PANGKALPINANG  
NOMOR /KPTUN.W5-TUN5/HK1.2.5/XI/2023  
TANGGAL 14 November 2023

**DAFTAR NAMA  
PANITIA SELEKSI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BANTUAN  
HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

| NO. | NAMA / NIP  | JABATAN                  |            |
|-----|---|--------------------------|------------|
|     |   | DINAS                    | TIM        |
| 1.  | FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.<br>NIP.19920211 201712 1 003     | Hakim                    | Ketua      |
| 2.  | ZULHAM IDRUS, S.Kom, S.H.,M.H.<br>NIP.19830913 201101 1 008 | PP                       | Sekretaris |
| 3.  | PANITERA  | Panitera                 | Anggota    |
| 4.  | SEKRETARIS  | Sekretaris               | Anggota    |
| 5.  | PANITERA MUDA PERKARA                                       | Panitera Muda<br>Perkara | Anggota    |
| 6.  | MOHAMMAD SOLEH, S.H.  | Panitera<br>Pengganti    | Anggota    |


  
ABDULLAH RIZKI ARDIANSYAH

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI LEMBAGA PENYEDIA BANTUAN HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM ( POSBAKUM ) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG;
- KESATU : Menunjuk kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Seleksi Lembaga Penyedia Bantuan Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- KEDUA : Bahwa Panitia Seleksi bertugas menerima pendaftaran, melakukan seleksi / verifikasi administrasi terhadap berkas persyaratan yang masuk dan selanjutnya mengumumkan hasil seleksi / verifikasi tersebut melalui papan pengumuman dan media lainnya setelah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- KETIGA : Bahwa Panitia Seleksi ini bekerja tanpa honorarium namun tetap dilandasi rasa tanggung-jawab;
- KEEMPAT : Bahwa Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan hasil seleksi diumumkan, dengan ketentuan apabila Keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada 14 November 2023

KEPUEA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
PANGKALPINANG,

  
WA ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NOMOR 692/KPTUN.W5-TUN5/HK1.2.5/XI/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERIAN LAYANAN  
BANTUAN HUKUM POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara No. 28/DjMT/Kep/III/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka perlu dibentuk Panitia Seleksi Lembaga Penyedia Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- b. Bahwa Panitia Seleksi yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara No. 28/DjMT/Kep/III/2014 Tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;



**PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI  
LAYANAN BANTUAN HUKUM POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

---

Pangkalpinang, 4 Desember 2023

Perihal : Rapat Undangan Koordinasi

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 692/KPTUN.W5-TUN5/HK1.2.5/XII/2023 Tanggal 14 November 2023, Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2024, maka kami selaku Ketua Panitia mengundang seluruh Anggota Panitia untuk hadir dalam Rapat Koordinasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 5 Desember 2023

Pukul : 14.00 WIB

Tempat : Ruang Media Center PTUN Pangkalpinang

Acara : Rapat Koordinasi Panitia Seleksi POSBAKUM PTUN Pangkalpinang untuk T.A. 2024.

Demikian undangan ini Kami sampaikan, agar dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris,

ZULHAM IDRUS  
NIP.198309122011011008

Ketua Panitia,

FEBRIANSYAH ROZARIUS  
NIP.199202112017121003



**BERITA ACARA  
RAPAT PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN  
BANTUAN HUKUM POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Pada hari ini Selasa, tanggal 5 Desember 2023, Pukul 13.00 WIB, telah dilaksanakan Rapat Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2024, yang dihadiri oleh seluruh Panitia dan bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Bahwa berdasarkan hasil rapat panitia, diperoleh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Persiapan Materi Pengumuman Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan mulai tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan 8 Desember 2023;
2. Pengumuman dan Pendaftaran atau penerimaan berkas Calon Peserta Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 15 Desember 2023;
3. Rapat Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan Verifikasi Dokumen Berkas/Data Peserta Seleksi, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023;
4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi peserta Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023;

5. Pemanggilan bagi peserta yang mendaftar dan telah lolos verifikasi berkas untuk hadir di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang guna dilakukan ujian kompetensi secara tertulis maupun wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 dan pada Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai;  
Materi mengenai ujian kompetensi terkait pengetahuan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara baik Formil maupun Materil, dan Pelayanan Bantuan Hukum kepada pencari keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.
6. Rapat Panitia untuk menentukan peserta yang lulus seleksi, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2023 dan Keputusan Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2024 tersebut bersifat final;
7. Pengumuman hasil seleksi untuk peserta yang lulus, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 melalui papan Pengumuman, Website dan Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, serta pemberitahuan kepada peserta;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dengan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris.

Sekretaris,



ZULHAM IDRUS  
NIP.198309122011011008

Ketua Panitia,



FEBRIANSYAH ROZARIUS  
NIP.199202112017121003



**DAFTAR NAMA DAN ABSENSI KEHADIRAN  
PANITIA SELEKSI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN  
BANTUAN HUKUM POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

**Hari : Selasa, Tanggal 5 Desember 2023**

| NO. | NAMA / NIP   | JABATAN                           |             | TANDA TANGAN/<br>PARAF |
|-----|--|-----------------------------------|-------------|------------------------|
|     |  | DINAS                             | KEPANITIAAN |                        |
| 1.  | Febriansyah Rozarius, S.H.<br>NIP.199202112017121003           | Hakim                             | Ketua       |                        |
| 2.  | Zulham Idrus, S.Kom., S.H., M.H.<br>NIP.198309122011011008     | Plt.<br>Panitera<br>Muda<br>Hukum | Sekretaris  |                        |
| 3.  | Boby Cahyadi, S.H.<br>NIP.197711271999031003                   | Panitera                          | Anggota     |                        |
| 4.  | Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.<br>NIP. 19811229006042015 | Sekretaris                        | Anggota     |                        |
| 5.  | Lezi Fitri, S.H.<br>NIP.197011201996032003                     | Panitera<br>Muda<br>Perkara       | Anggota     |                        |
| 6.  | Mohammad Soleh, S.H.<br>NIP. 196904301995031001                | Analisis<br>Perkara<br>Peradilan  | Anggota     |                        |

Sekretaris,

ZULHAM IDRUS  
NIP.198309122011011008

Ketua Panitia,

FEBRIANSYAH ROZARIUS  
NIP.199202112017121003

**RAPAT KOORDINASI PANITIA SELEKSI PENYEDIA LAYANAN BANTUAN  
HUKUM (POSBAKUM) TANGGAL 5 DESEMBER 2023**





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN**  
**PERADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**  
Jalan Pulau Bangka, Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru,  
Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
<https://www.ptun-pangkalpinang.go.id/>

**PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN BANTUAN HUKUM**  
**POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**PENGUMUMAN**

Nomor 1/Pansel-Posbakum-PTUN.PGP/2023

**TENTANG**  
**SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN BANTUAN HUKUM**  
**POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 692/KPTUN.W5-TUN5/HK1.2.5/XII/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Hasil Rapat Koordinasi Panitia pada tanggal 5 Desember 2023, dengan ini diumumkan bahwa **Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang akan mengadakan seleksi lembaga pemberi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2024** dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. Formasi Penerimaan**

Lembaga pemberi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berasal dari:

1. lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum;
2. unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat; atau
3. lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi.

**B. Persyaratan**

1. Berbentuk badan hukum dengan melampirkan akta notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang atau mempunyai perwakilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan melampirkan keterangan domisili lembaga;
3. Menyampaikan surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan/direktur/ ketua lembaga dan ditujukan kepada Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mengikuti seleksi lembaga pemberi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024;
4. Memiliki rekening dan NPWP atas nama lembaga;
5. Memiliki minimal 1 (satu) orang Advokat;
6. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
7. Memiliki staf atau anggota untuk ditugaskan di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang bergelar sarjana hukum;
8. Lulus Tes Kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
9. Bersedia menandatangani kontrak dan pakta integritas serta menaati segala peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait dengan Posbakum Pengadilan.

### C. Proses Seleksi

#### 1. Tahapan Seleksi

- Pengumuman dan Pendaftaran : 11 - 15 Desember 2023
- Pengumuman Hasil Verifikasi Dokumen : 19 Desember 2023
- Tes Kualifikasi : 27 Desember 2023
- Pengumuman Hasil Seleksi : 29 Desember 2023
- Penandatanganan Kontrak : 2 Januari 2024

#### 2. Penerimaan Dokumen Persyaratan

a. Dokumen persyaratan disampaikan kepada Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum PTUN Pangkalpinang selama masa Pengumuman dan Pendaftaran (**11 - 15 Desember 2023, pukul 08.00 s.d. 16.30 WIB**) melalui PTSP PTUN Pangkalpinang, Jalan Pulau Bangka, Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Daftar urutan penyampaian dokumen:

1. Asli surat permohonan;
2. Fotokopi akta pendirian dan perubahan;
3. Fotokopi surat keterangan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;
4. Fotokopi surat keterangan domisili lembaga;
5. Fotokopi KTP pimpinan/direktur/ketua lembaga;
6. Fotokopi NPWP dan buku rekening lembaga;
7. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat;
8. Fotokopi KTP dan ijazah calon Petugas Posbakum.

#### 3. Tes Kualifikasi

Pendaftar yang telah lolos verifikasi dokumen akan diundang untuk mengikuti tes kualifikasi berupa tes tertulis dan wawancara yang wajib diikuti oleh pimpinan/penanggung jawab lembaga pendaftar dan calon Petugas Posbakum.

#### 4. Lain-Lain

Hasil verifikasi dokumen, tes kualifikasi maupun hasil seleksi yang ditetapkan oleh Panitia tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 11 Desember 2023

Ketua Panitia



Febriansyah Rozarius

## 1. WEBSITE POSBAKUM DI PTUN PANGKALPINANG

**BerAKHLAK**  
Meningkatkan Pelayanan, Akuntabilitas & Kompetensi  
- hormatitas | loyal | keagresifan | kolaborasi

#bangga  
melayani  
bangsa

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

# PENGUMUMAN

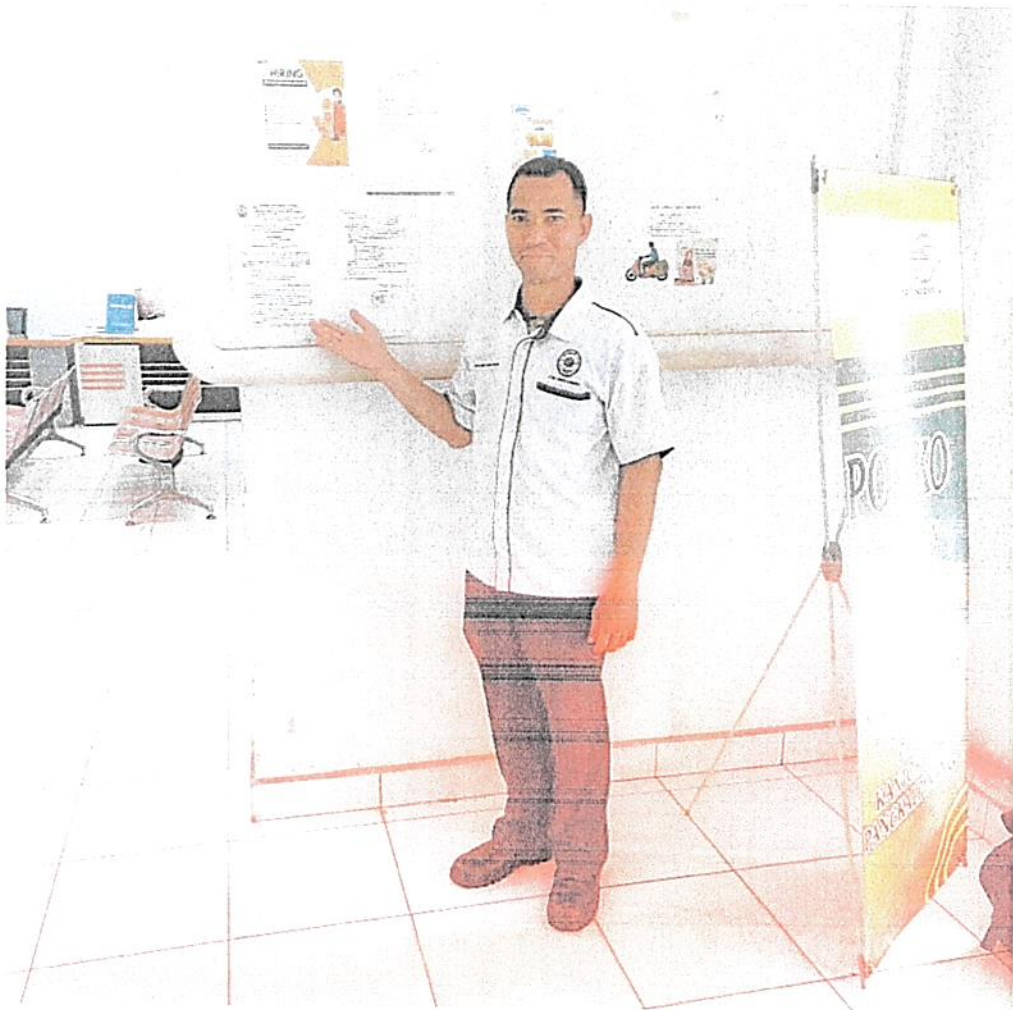
Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)  
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2024

- Pengumuman dan Pendaftaran  
11 Desember s.d 15 Desember 2023
- Pengumuman Hasil Verifikasi Dokumen  
19 Desember 2023
- Tes Kualifikasi  
27 Desember 2023
- Pengumuman Hasil Seleksi  
29 Desember 2023
- Penandatanganan Kontrak  
2 Januari 2024

Syarat dan Ketentuan lebih lanjut dapat di cek pada  
Website Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang  
[www.ptun-pangkalpinang.go.id](http://www.ptun-pangkalpinang.go.id)

[www.ptun-pangkalpinang.go.id](http://www.ptun-pangkalpinang.go.id) Ptun Pangkal Pinang Ptun\_pangkalpinang Ptun Pangkalpinang

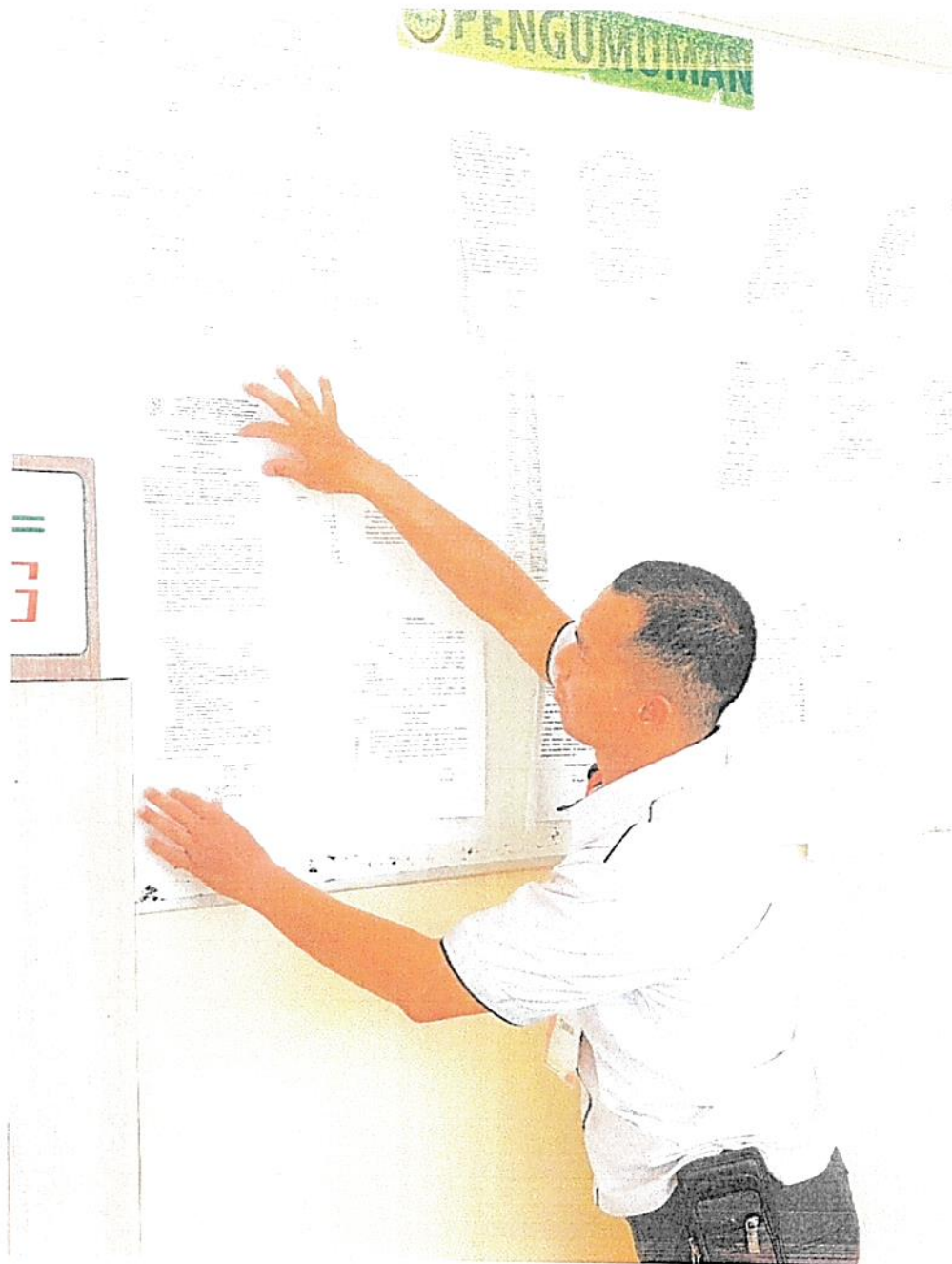
## 2. PAPAN PENGUMUMAN DI KANTOR POS PANGKALPINANG



### 3. PAPAN PENGUMUMAN DI PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG



#### 4. PAPAN PENGUMUMAN DI PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684, [www.ptun-pangkalpinang.go.id](http://www.ptun-pangkalpinang.go.id), [info@ptun-pangkalpinang.go.id](mailto:info@ptun-pangkalpinang.go.id)

**PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN BANTUAN HUKUM  
POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pangkalpinang, 18 Desember 2023

Nomor : 02/Pansel.Posbakum/PTUN.PGP/XII/2023  
Lampiran : 1 (eksemplar)  
Perihal : Verifikasi Berkas/Data Calon Peserta Seleksi

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2023, maka kami selaku Ketua Panitia mengundang seluruh Anggota Panitia untuk hadir dalam tahapan verifikasi berkas/data calon peserta seleksi, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Desember 2023

Pukul : 15.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Media Center PTUN Pangkalpinang

Acara : Verifikasi Berkas/Data Calon Peserta Seleksi

Demikian undangan ini Kami sampaikan, agar dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris,

ZULHAM IDRUS  
NIP.198309122011011008

Ketua Panitia,



FEBRIANSYAH ROZARIUS  
NIP.199202112017121003



**REPUBLIC OF INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN**  
**PERADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684, [www.ptun-pangkalpinang.go.id](http://www.ptun-pangkalpinang.go.id), [info@ptun-pangkalpinang.go.id](mailto:info@ptun-pangkalpinang.go.id)

**BERITA ACARA VERIFIKASI DOKUMEN**  
**SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**I. PELAKSANAAN VERIFIKASI DOKUMEN:**

Waktu : Senin, 18 Desember 2023, Pukul 15.30-16.30 WIB

Lokasi : Media Center PTUN Pangkalpinang

**II. PESERTA:**

1. Febriansyah Rozarius, S.H. (Hakim) selaku Ketua Panitia;
2. Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. (Sekretaris) selaku Anggota Panitia;
3. Lezi Fitri, S.H. (Panitera Muda Perkara/Plh. Panitera) selaku Anggota Panitia;
4. Mohammad Soleh, S.H. (Klerik - Analis Perkara Peradilan) selaku Anggota Panitia; dan
5. Zulham Idrus, S.Kom., S.H., M.H. (Panitera Pengganti) selaku Sekretaris Panitia.

**III. PENDAFTAR:**

1. Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pancasila (Budiana Rachmawaty, S.H., M.H.)
2. Lembaga Bantuan Hukum Keadilan untuk Bangsa Indonesia (Cahya Wiguna, S.H., M.H., CLA., CTL.)
3. Yayasan Hukum Gerbang Keadilan (Apri Sunarsi, S.H.)
4. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (Apri Anggara, S.H.)

**IV. HASIL VERIFIKASI DOKUMEN:**

1. Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pancasila  
Catatan:  
Dokumen utama sudah dilampirkan, namun fotokopi KTP dan fotokopi ijazah calon Petugas Posbakum belum dilampirkan.
2. Lembaga Bantuan Hukum Keadilan untuk Bangsa Indonesia  
Catatan:
  - Nama dan jabatan pejabat yang menandatangani surat permohonan tidak sesuai dengan nama dan jabatan di akta pendirian;

- Dokumen persyaratan tidak konsisten, beberapa dokumen menggunakan badan hukum yayasan dan dokumen lainnya menggunakan LBH;
  - Dokumen dinyatakan tidak lengkap dan peserta dinyatakan tidak lolos verifikasi dokumen.
3. Yayasan Hukum Gerbang Keadilan  
Catatan:  
Dokumen utama sudah dilampirkan, namun fotokopi SK pengesahan badan hukum dari Kemenkumham RI belum dilampirkan.
4. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung  
Catatan:  
Dokumen lengkap.

Lembar Verifikasi Dokumen dari masing-masing peserta terlampir dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berita acara ini.

## V. KESIMPULAN

Peserta yang dapat diumumkan lolos verifikasi dokumen dan diundang untuk mengikuti Tes Kualifikasi adalah:


- **Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pancasila;**
- **Yayasan Hukum Gerbang Keadilan; dan**
- **Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung.**

Peserta yang tidak lolos verifikasi dokumen adalah:


**Lembaga Bantuan Hukum Keadilan untuk Bangsa Indonesia.**

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Ketua Panitia,  
  
Febriansyah R., S.H.

Anggota Panitia,  
  
Dora N.S., S.E., M.M.

Anggota Panitia,  
  
Lezi Fitri, S.H.

Anggota Panitia,  
  
M. Soleh, S.H.

Sekretaris Panitia,  
  
Zulham Idrus, S.Kom., S.H., M.H.



**DAFTAR NAMA DAN ABSENSI KEHADIRAN**  
**PANITIA UNTUK VERIFIKASI BERKAS CALON PESERTA**  
**SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN**  
**BANTUAN HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**  
**Hari : Senin, Tanggal 18 Desember 2023**

| NO. | NAMA / NIP   | JABATAN                           |             | TANDA TANGAN/<br>PARAF |
|-----|--|-----------------------------------|-------------|------------------------|
|     |  | DINAS                             | KEPANITIAAN |                        |
| 1.  | Febriansyah Rozarius, S.H.<br>NIP.199202112017121003           | Hakim                             | Ketua       |                        |
| 2.  | Zulham Idrus, S.Kom., S.H., M.H.<br>NIP.198309122011011008     | Plt.<br>Panitera<br>Muda<br>Hukum | Sekretaris  |                        |
| 3.  | Boby Cahyadi, S.H.<br>NIP.197711271999031003                   | Panitera                          | Anggota     | CUTI                   |
| 4.  | Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.<br>NIP. 19811229006042015 | Sekretaris                        | Anggota     |                        |
| 5.  | Lezi Fitri, S.H.<br>NIP.197011201996032003                     | Panitera<br>Muda<br>Perkara       | Anggota     |                        |
| 6.  | Mohammad Soleh, S.H.<br>NIP. 196904301995031001                | Analisis<br>Perkara<br>Peradilan  | Anggota     |                        |

Sekretaris,

ZULHAM IDRUS  
NIP.198309122011011008

Ketua Panitia,

FEBRIANSYAH ROZARIUS  
NIP.199202112017121003

**LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN  
SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**NAMA LEMBAGA PENDAFTAR:**

LPH DAN HAM PANCASILA

**TANGGAL VERIFIKASI DOKUMEN:** 18 Desember 2023

|  |   |
|--|---|
| Asli surat permohonan  | ✓ |
| Fotokopi akta pendirian dan perubahan  | ✓ |
| Fotokopi surat keterangan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM                 | ✓ |
| Fotokopi surat keterangan domisili lembaga                                       | ✓ |
| Fotokopi KTP pimpinan/direktur/ketua lembaga                                     | ✓ |
| Fotokopi NPWP lembaga  | ✓ |
| Fotokopi buku rekening lembaga   | ✓ |
| Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat  | ✓ |
| Fotokopi KTP calon Petugas Posbakum  | ✗ |
| Fotokopi ijazah calon Petugas Posbakum   | ✗ |
| <b>Catatan:</b><br>Tidak ada Fotokopi, KTP, dan Ijazah Calon Petugas<br>POSBAKUM |   |

Ketua Panitia,



Febriansyah R., S.H.

Anggota Panitia,



Dora N.S., S.E., M.M.

Anggota Panitia,



Lezi Fitri, S.H.

Anggota Panitia,



M. Soleh, S.H.

Sekretaris Panitia,



Zulham Idrus, S.Kom., S.H., M.H.

**LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN  
SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**NAMA LEMBAGA PENDAFTAR:**

YAYASAN HUKUM GERBANG KEADILAN

**TANGGAL VERIFIKASI DOKUMEN:** 18 Desember 2023

|   |   |
|---|---|
| Asli surat permohonan   | ✓ |
| Fotokopi akta pendirian dan perubahan   | ✓ |
| Fotokopi surat keterangan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM                          | ✗ |
| Fotokopi surat keterangan domisili lembaga  | ✓ |
| Fotokopi KTP pimpinan/direktur/ketua lembaga  | ✓ |
| Fotokopi NPWP lembaga   | ✓ |
| Fotokopi buku rekening lembaga  | ✓ |
| Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat   | ✓ |
| Fotokopi KTP calon Petugas Posbakum   | ✓ |
| Fotokopi ijazah calon Petugas Posbakum  | ✓ |
| Catatan:<br>FOTOKOPI PENDESASAHAN AKTA PENDIRIAN DARI<br>KEMENKUMHAM RI BELUM DILAMPIRKAN |   |

Ketua Panitia,



Febriansyah R., S.H.

Anggota Panitia,



Dora N.S., S.E., M.M.

Anggota Panitia,



Lezi Fitri, S.H.

Anggota Panitia,



M. Soleh, S.H.

Sekretaris Panitia,



Zulham Idrus, S.Kom., S.H., M.H.

**LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN  
SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**NAMA LEMBAGA PENDAFTAR:**

PERKUMPULAN LBH LEGAL JUSTICE BABEL

**TANGGAL VERIFIKASI DOKUMEN:** 18 Desember 2023

|  |   |
|--|---|
| Asli surat permohonan  | ✓ |
| Fotokopi akta pendirian dan perubahan                            | ✓ |
| Fotokopi surat keterangan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM | ✓ |
| Fotokopi surat keterangan domisili lembaga                       | ✓ |
| Fotokopi KTP pimpinan/direktur/ketua lembaga                     | ✓ |
| Fotokopi NPWP lembaga  | ✓ |
| Fotokopi buku rekening lembaga                                   | ✓ |
| Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat                            | ✓ |
| Fotokopi KTP calon Petugas Posbakum                              | ✓ |
| Fotokopi ijazah calon Petugas Posbakum                           | ✓ |
| Catatan:<br><br>dokumen lengkap                                  |   |

Ketua Panitia,



Febriansyah R., S.H.

Anggota Panitia,



Dora N.S., S.E., M.M.

Anggota Panitia,



Lezi Fitri, S.H.

Anggota Panitia,



M. Soleh, S.H.

Sekretaris Panitia,



Zulham Idrus, S.Kom., S.H., M.H.

**LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN  
SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**NAMA LEMBAGA PENDAFTAR:**

.....LBH KEADILAN UNTUK BANGSA INDONESIA.....

**TANGGAL VERIFIKASI DOKUMEN:** .....18 Desember 2023.....

|  |   |
|--|---|
| Asli surat permohonan  | ✓ |
| Fotokopi akta pendirian dan perubahan                            | ✗ |
| Fotokopi surat keterangan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM | ✗ |
| Fotokopi surat keterangan domisili lembaga                       | ✓ |
| Fotokopi KTP pimpinan/direktur/ketua lembaga                     | ✓ |
| Fotokopi NPWP lembaga  | ✓ |
| Fotokopi buku rekening lembaga                                   | ✓ |
| Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat                            | ✓ |
| Fotokopi KTP calon Petugas Posbakum                              | ✓ |
| Fotokopi ijazah calon Petugas Posbakum                           | ✓ |

Catatan: 1. Nama dan jabatan peserta di surat Lamaran dan di akta pendirian tidak sesuai,  
2. Dokumen persyaratan tidak konsisten,  
yakni penggunaan dokumen Yayasan dan Lembaga Bantuan Hukum

**DOKUMEN PINYATAKAN TIDAK LENGKAP  
(TIDAK LOLOS VERIFIKASI DOKUMEN)**

Ketua Panitia,

Febriansyah R., S.H.

Anggota Panitia,

Dora N.S., S.E., M.M.

Anggota Panitia,

Lezi Fitri, S.H.

Anggota Panitia,

M. Soleh, S.H.

Sekretaris Panitia,

Zulham Idrus, S.Kom., S.H., M.H.

**RAPAT PANITIA VERIFIKASI BERKAS CALON PESERTA SELEKSI**

**TANGGAL 18 DESEMBER 2023**





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN**  
**PERADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

**PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN BANTUAN HUKUM**  
**POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**PENGUMUMAN**

Nomor 2/Pansel-Posbakum-PTUN.PGP/2023

**TENTANG**  
**HASIL VERIFIKASI DOKUMEN**  
**PESERTA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM**

Menindaklanjuti dokumen-dokumen persyaratan yang telah disampaikan oleh para peserta Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pada tanggal 18 Desember 2023 untuk memverifikasi dokumen-dokumen persyaratan yang telah diajukan, maka dengan ini diumumkan peserta Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang hasil yang lolos verifikasi dokumen sebagai berikut:

- **LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PANCASILA**  
Catatan: Harap melengkapi fotokopi KTP dan ijazah calon Petugas Posbakum
- **YAYASAN HUKUM GERBANG KEADILAN**  
Catatan: Harap melengkapi fotokopi SK Kemenkumham RI tentang pengesahan badan hukum
- **PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG**  
Catatan: Dokumen lengkap.

Lembaga peserta seleksi yang lolos verifikasi dokumen diundang untuk melaksanakan Tes Kualifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:


- Tes Kualifikasi akan dilaksanakan pada **Rabu, 27 Desember 2023**, bertempat di **Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang**;
- Tes Kualifikasi wajib diikuti oleh pimpinan lembaga dan calon Petugas Posbakum;
- Tes Kualifikasi dilaksanakan dengan tahapan:
  1. **Tes Tertulis (pukul 09.00 WIB - 10.00 WIB)**; dan
  2. **Wawancara (pukul 10.00 WIB - selesai)**;
- Materi tes kualifikasi adalah hukum materil dan hukum acara peradilan tata usaha negara;
- Diharapkan membawa **dokumen asli** untuk ditunjukkan pada saat wawancara sebagai berikut:
  1. akta pendirian dan perubahan;
  2. surat keterangan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;
  3. surat keterangan domisili lembaga;
  4. KTP pimpinan/direktur/ketua lembaga;
  5. NPWP dan buku rekening lembaga;

6. Kartu Tanda Pengenal Advokat;
  7. KTP dan ijazah calon Petugas Posbakum;
- Hasil verifikasi dokumen, tes kualifikasi maupun hasil seleksi yang ditetapkan oleh Panitia tidak dapat diganggu gugat.


Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 19 Desember 2023

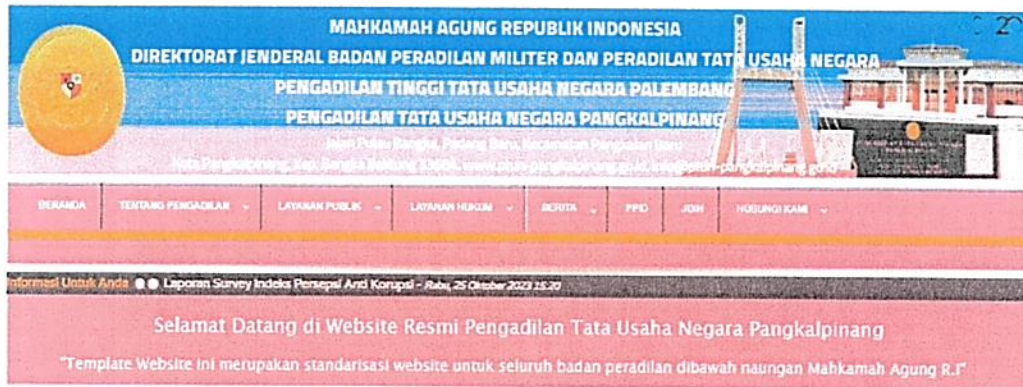
Ketua Panitia



Febransyah Rozarius



# 1. WEBSITE POSBAKUM DI PTUN PANGKALPINANG



## PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PESERTA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

### Pengumuman

Dengan ini mengumumkan Peserta Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Posbakum PTUN Pangkalpinang yang lolos verifikasi dokumen adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pancasila (Catatan : Harap melengkapi fotokopi KTP dan Ijazah Calon Petugas POSBAKUM)
2. Yayasan Hukum Gerbang Keadilan (Catatan : Harap melengkapi fotokopi SK Kemenkumham RI tentang Pengesahan Badan Hukum)
3. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (Catatan : Dokumen Lengkap)

Lembaga Peserta Seleksi yang lolos verifikasi Dokumen dapat melaksanakan Tes Kualifikasi pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023

Tempat : PTUN Pangkalpinang

Pukul : Test Tertulis : 09.00 WIB – 10.00 WIB

Test Wawancara : 10.00 WIB – selesai

Materi : Hukum Materi dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Untuk Pengumuman Lebih Lengkap, dapat dilihat dibawah ini.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN BANTUAN HUKUM  
POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

#### PENGUMUMAN

Nomor Pengumuman: PTUN/PK/2023

#### TENTANG HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PESERTA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM

Mengumumkan dokumen dokumen persyaratan yang telah diperiksa oleh para peserta seleksi Lembaga Pemberi Layanan Hukum Pos Bantuan Hukum (Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Maka dengan ini mengumumkan kepada seluruh peserta seleksi yang telah mengikuti seleksi pada tanggal 10 Desember 2023 untuk memenuhi dokumen persyaratan yang telah diperiksa dan dengan ini mengumumkan kepada Lembaga Pemberi Layanan Hukum Pos Bantuan Hukum (Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang lolos verifikasi dokumen sebagai berikut:

**LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PANCASILA**  
Catatan: Harap melengkapi fotokopi KTP dan Ijazah Calon Petugas Posbakum

**YAYASAN HUKUM GERBANG KEADILAN**  
Catatan: Harap melengkapi fotokopi SK Kemenkumham RI tentang pengesahan badan hukum

**PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG**  
Catatan: Dokumen Lengkap

Lembaga Peserta Seleksi yang lolos verifikasi dokumen dapat melaksanakan Tes Kualifikasi pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023

Tempat : PTUN Pangkalpinang

Pukul : Test Tertulis : 09.00 WIB – 10.00 WIB

Test Wawancara : 10.00 WIB – selesai

Materi : Hukum Materi dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Untuk Pengumuman Lebih Lengkap, dapat dilihat dibawah ini.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN**  
**PERADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684, [www.ptun-pangkalpinang.go.id](http://www.ptun-pangkalpinang.go.id), [info@ptun-pangkalpinang.go.id](mailto:info@ptun-pangkalpinang.go.id)

**SURAT PANGGILAN**

Nomor 3/Pansel-Posbakum-PTUN.PGP/2023

Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan ini memanggil:

- Nama : 1. BUDIANA RACHMAWATY, S.H., M.H. selaku Ketua Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM PANCASILA)  
2. Calon Petugas Posbakum dari Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM PANCASILA)
- Alamat Lembaga : Jalan Melati No. 258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Agar hadir di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sehubungan dengan permohonan keikutsertaan Saudara/i dalam Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2024 yang Saudara/i ajukan kepada kami, guna mengikuti tahapan seleksi yang akan dilaksanakan pada:

- Hari : **RABU**  
Tanggal : **27 Desember 2023**  
Pukul : **09.00 WIB sampai dengan selesai**  
Acara : **Ujian Kualifikasi Tes Tertulis dan Wawancara**  
Tempat : Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian panggilan ini disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 19 Desember 2023

Ketua Panitia

  
**FEBRIANSYAH ROZARIUS**

**Catatan:**

- Peserta **wajib** membawa seluruh berkas asli untuk disesuaikan dengan berkas permohonan yang telah diajukan.
- Peserta dan Calon Petugas Posbakum agar hadir 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN**  
**PERADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684, [www.ptun-pangkalpinang.go.id](http://www.ptun-pangkalpinang.go.id), [info@ptun-pangkalpinang.go.id](mailto:info@ptun-pangkalpinang.go.id)

**SURAT PANGGILAN**

Nomor 4/Pansel-Posbakum-PTUN.PGP/2023

Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan ini memanggil:

- Nama : 1. APRI SUNARSI, S.H. selaku Ketua Yayasan Hukum Gerbang Keadilan (YAYASAN HUKUM GERBANG KEADILAN)  
2. Calon Petugas Posbakum dari Yayasan Hukum Gerbang Keadilan (YAYASAN HUKUM GERBANG KEADILAN)
- Alamat Lembaga : Jalan Solihin GP, No.65, RT.09/RW.03, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Agar hadir di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sehubungan dengan permohonan keikutsertaan Saudara/i dalam Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2024 yang Saudara/i ajukan kepada kami, guna mengikuti tahapan seleksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari : **RABU**  
Tanggal : **27 Desember 2023**  
Pukul : **09.00 WIB sampai dengan selesai**  
Acara : **Ujian Kualifikasi Tes Tertulis dan Wawancara**  
Tempat : Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian panggilan ini disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 19 Desember 2023

Ketua Panitia

  
**FEBRIANSYAH ROZARIUS**

**Catatan:**

- Peserta **wajib** membawa seluruh berkas asli untuk disesuaikan dengan berkas permohonan yang telah diajukan.
- Peserta dan Calon Petugas Posbakum agar hadir 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN**  
**PERADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684, [www.ptun-pangkalpinang.go.id](http://www.ptun-pangkalpinang.go.id), [info@ptun-pangkalpinang.go.id](mailto:info@ptun-pangkalpinang.go.id)

**SURAT PANGGILAN**

Nomor 5/Pansel-Posbakum-PTUN.PGP/2023

Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan ini memanggil:

- Nama : 1. APRI ANGGARA, S.H. selaku Ketua Umum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (LEGAL JUSTICE)  
2. Calon Petugas Posbakum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (LEGAL JUSTICE)
- Alamat Lembaga : Jalan Betutu, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Agar hadir di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sehubungan dengan permohonan keikutsertaan Saudara/i dalam Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2024 yang Saudara/i ajukan kepada kami, guna mengikuti tahapan seleksi yang akan dilaksanakan pada:

- Hari : **RABU**  
Tanggal : **27 Desember 2023**  
Pukul : **09.00 WIB sampai dengan selesai**  
Acara : **Ujian Kualifikasi Tes Tertulis dan Wawancara**  
Tempat : Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian panggilan ini disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 19 Desember 2023

Ketua Panitia

  
**FEBRIANSYAH ROZARIUS**

**Catatan:**

- Peserta **wajib** membawa seluruh berkas asli untuk disesuaikan dengan berkas permohonan yang telah diajukan.
- Peserta dan Calon Petugas Posbakum agar hadir 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai.

---

**SURAT PANGGILAN**

1 pesan

---

**PTSP PTUN PANGKALPINANG** <ptsp.ptunpangkalpinang2018@gmail.com>  
Kepada: justitiaomnibus11@gmail.com

19 Desember 2023 pukul 14.19

Kepada Yth.  
YAYASAN HUKUM GERBANG Keadilan JUSTITIA OMNIBUS

Dengan Hormat,  
Kami dari PTUN PANGKALPINANG menyampaikan Surat Panggilan.  
Terima Kasih

---

 **4. Surat Panggilan. YAYASAN HKM GERBANG Keadilan.pdf**  
300K



PTSP PTUN PANGKALPINANG <ptsp.ptunpangkalpinang2018@gmail.com>

## SURAT PANGGILAN


1 pesan

PTSP PTUN PANGKALPINANG <ptsp.ptunpangkalpinang2018@gmail.com>  
Kepada: "legaljusticebabel@gmail.com" <legaljusticebabel@gmail.com>

19 Desember 2023 pukul 14.17

Kepada Yth.  
PLBH LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG

Dengan Hormat,  
Kami dari PTUN PANGKALPINANG menyampaikan Surat Panggilan.  
Terima Kasih

 5. Surat Panggilan. LBH LEGAL JUSTICE.pdf  
302K

**PELAKSANAAN UJIAN KUALIFIKASI TES TERTULIS DAN WAWANCARA  
PESERTA SELEKSI POSBAKUM  
TANGGAL 27 DESEMBER 2023**

**1. Ujian Tertulis**



**2. Ujian Wawancara**





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN**  
**PERADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684, [www.ptun-pangkalpinang.go.id](http://www.ptun-pangkalpinang.go.id), [info@ptun-pangkalpinang.go.id](mailto:info@ptun-pangkalpinang.go.id)

Pangkalpinang, 28 Desember 2023

Nomor : 6/Pansel-Posbakum-PTUN.PGP/2023  
Lampiran : 1 (eksemplar)  
Perihal : Rapat Keputusan Panitia

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti hasil Ujian Kompetensi secara tertulis dan wawancara termasuk verifikasi berkas terhadap peserta oleh Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2023, maka kami selaku Ketua Panitia mengundang seluruh Anggota Panitia untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Desember 2023  
Pukul : 14.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pangkalpinang  
Acara : Rapat Panitia guna menentukan dan menetapkan peserta yang lulus seleksi.

Demikian undangan ini disampaikan, agar dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua Panitia,

  
FEBRIANSYAH ROZARIUS  
NIP. 199202112017121003



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER**  
**DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684, [www.ptun-pangkalpinang.go.id](http://www.ptun-pangkalpinang.go.id), [info@ptun-pangkalpinang.go.id](mailto:info@ptun-pangkalpinang.go.id)

## BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis, tanggal 28 Desember 2023, Pukul 14.00 WIB, telah dilaksanakan Rapat Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan pembahasan tindak lanjut dan pengambilan keputusan atas pelaksanaan verifikasi berkas, ujian kompetensi tertulis dan wawancara terhadap Peserta Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang hadir adalah:

- |   |   |
|---|---|
| 1. FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.           | Sebagai Ketua Panitia;                      |
| 2. ZULHAM IDRUS, S.KOM., S.H., M.H.     | Sebagai Sekretaris;                         |
| 3. BOBY CAHYADI, S.H.                   | Sebagai Anggota;                            |
| 4. DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M. | Sebagai Anggota;                            |
| 5. LEZI FITRI, S.H.                     | Sebagai Anggota;                            |
| 6. MOHAMMAD SOLEH, S.H.                 | Sebagai Anggota (tidak hadir karena sakit); |

Bahwa Panitia telah menerima kelengkapan berkas dari peserta yang telah mendaftar mengikuti Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, mulai tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 sebanyak 4 (empat) peserta, ada 3 (tiga) peserta yang lolos verifikasi dokumen, adalah:

1. **Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM PANCASILA)**, berkedudukan di Jalan Melati No. 258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang, dalam hal ini diwakili oleh BUDIANA RACHMAWATY, S.H., M.H.

selaku Ketua Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM PANCASILA), dan secara umum telah memenuhi syarat administrasi;

2. **Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (LEGAL JUSTICE)**, berkedudukan di Jalan Betutu, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh APRI ANGGARA, S.H. selaku Ketua Umum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (LEGAL JUSTICE), dan secara umum telah memenuhi syarat administrasi;
3. **Yayasan Hukum Gerbang Keadilan**, berkedudukan di Jalan Solihin GP, No.65, RT.09/RW.03, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh APRI SUNARSI, S.H. selaku Ketua Yayasan Hukum Gerbang Keadilan, dan secara umum telah memenuhi syarat administrasi;

Bahwa untuk Tes Kualifikasi secara tes tertulis dan wawancara, Panitia telah sepakat untuk memberikan bobot penilaian 25% (dua puluh lima persen) untuk hasil tes tertulis dan 25% (dua puluh lima persen) untuk hasil wawancara dari masing-masing pimpinan lembaga, dan bobot penilaian 25% (dua puluh lima persen) untuk hasil test tertulis dan 25% (dua puluh lima persen) untuk hasil wawancara dari masing-masing Calon Petugas Posbakum;

Bahwa 3 (tiga) peserta yang mengikuti Tes Kualifikasi berupa tes tertulis dan tes wawancara, adalah sebagai berikut:

1. **Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM PANCASILA):**
  - BUDIANA RACHMAWATY, S.H., M.H. selaku Ketua Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM PANCASILA);
  - IVEN KHURNIA, S.H. selaku calon Petugas Posbakum;
2. **Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (LEGAL JUSTICE):**
  - APRI ANGGARA, S.H. selaku Ketua Umum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (LEGAL JUSTICE);
  - INNEKE LARAS AMBARSARI, S.H. selaku calon Petugas Posbakum;
3. **Yayasan Hukum Gerbang Keadilan:**
  - FEBRI AGINTA GINTING, S.H., M.H. selaku Anggota Yayasan Hukum Gerbang Keadilan;

- CHITA ARDAYANI, S.H. selaku calon Petugas Posbakum;

Bahwa Nilai yang diperoleh oleh masing-masing peserta adalah sebagai berikut:

|                      | <b>LPH<br/>PANCASILA</b> | <b>Lembaga<br/>LEGAL JUSTICE</b> | <b>Yayasan Hukum<br/>GERBANG<br/>KEADILAN</b> |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
| Tertulis (Pimpinan)  | 17                       | 13                               | 8   |
| Tertulis (Petugas)   | 2                        | 1                                | 0   |
| Wawancara (Pimpinan) | 21                       | 23                               | 22  |
| Wawancara (Petugas)  | 13                       | 21                               | 14  |
| <b>NILAI</b>         | <b>53</b>                | <b>54</b>                        | <b>44</b>                                     |

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketiga peserta dalam mengikuti tes tertulis dan wawancara, kemudian kepada seluruh Panitia diberikan kesempatan masing-masing untuk memberikan pendapat dan penilaian disertai argumentasi terhadap Peserta Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2024;

Bahwa pada akhirnya seluruh Panitia mengambil keputusan, bahwa peserta yang paling memenuhi kriteria dan persyaratan serta memperoleh nilai tertinggi Seleksi Lembaga Pemberi Layanan bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024, adalah :

**PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG (LEGAL JUSTICE)**, berkedudukan di Jalan Betutu, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh APRI ANGGARA, S.H. selaku Ketua Umum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (LEGAL JUSTICE).

Bahwa hasil keputusan panitia tersebut akan dituangkan ke dalam Keputusan Ketua Panitia yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, serta akan diumumkan kepada khalayak umum melalui papan pengumuman, website dan media sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia yang hadir.

Sekretaris



ZULHAM IDRUS  
NIP.198309122011011008

Ketua Panitia,



FEBRIANSYAH ROZARIUS  
NIP.19920220112017121003

Anggota:



1. BOBY CAHYADI  
NIP.197711271999031003



2. DORA NATALIA SINGARIMBUN  
NIP.19811229006042015



3. LEZI FITRI  
NIP.197011201996032003

(Cuti sakit)

4. MOHAMMAD SOLEH  
NIP.196904301995031001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER**  
**DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**  
Jalan Pulau Bangka, Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN**  
**BANTUAN HUKUM POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**  
**Nomor : 7/Pansel-Posbakum-PTUN.PGP/2023**

**TENTANG**  
**PEMENANG SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN BANTUAN HUKUM**  
**POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**  
**UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024**

Ketua Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Menimbang : Bahwa untuk menindaklanjuti hasil Rapat Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2023, dipandang perlu menetapkan Pemenang Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 692/KPTUN.W5-TUN5/HK1.2.5/XII/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

2. Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara

Pangkalpinang, tanggal 5 Desember 2023 tentang Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024;

3. Berita Acara Verifikasi Dokumen Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024, tanggal 18 Desember 2023 tentang Peserta yang Lolos Verifikasi Dokumen;
4. Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 28 Desember 2023 tentang Hasil Tes Kualifikasi Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pemenang Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024 adalah **Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (LEGAL JUSTICE)**, berkedudukan di Jalan Betutu, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh APRI ANGGARA, S.H. selaku Ketua Umum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (LEGAL JUSTICE);
- Kedua : Hasil Keputusan Ketua Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ini, akan

diumumkan kepada masyarakat pada tanggal 29 Desember 2023;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila ada kekeliruan pada keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada Tanggal : 28 Desember 2023

Ketua Panitia,



**FEBRIANSYAH ROZARIUS**

NIP.19920220112017121003

**RAPAT KEPUTUSAN PANITIA  
TANGGAL 28 DESEMBER 2023**





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 8/Pansel-Posbakum-PTUN.PGP/2023**

Berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 dan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 7/Pansel-Posbakum-PTUN.PGP/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pemenang Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini diumumkan bahwa yang memenuhi kriteria dan memperoleh nilai tertinggi diurutkan sebagai berikut:

1. **PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG (LEGAL JUSTICE);**
2. **LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA PANCASILA (LPH & HAM PANCASILA);**
3. **YAYASAN HUKUM GERBANG Keadilan;**

Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui oleh khalayak umum.

Pangkalpinang, 29 Desember 2023

Ketua Panitia,



**FEBRIANSYAH ROZARIUS**  
NIP.19920220112017121003



## PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM

### LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG

Jl. Betutu Raya Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Email : [legaljusticebabel@gmail.com](mailto:legaljusticebabel@gmail.com), Hp/WA : 082377222193

Pangkalpinang, 14 Desember 2023

Nomor : 01/P/PLBHLEGALJUSTICEBABEL/XII/2023

Lampiran : Dokumen Penawaran

Kepada Yth.:

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Cq. Pejabat Pengadaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Di -

Pangkalpinang

**Perihal : Penawaran Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum  
Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024**

Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami dari "Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung" mengajukan penawaran untuk pekerjaan Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.


Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai bulan Januari sampai dengan Desember, dengan rincian setiap hari kerja : Hari Senin s/d Jumat (Sesuai Jam Layanan pada Pengadaan Jasa Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang).

Surat permohonan Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy dari aslinya.

Dengan disampaikannya Surat permohonan Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Demikian permohonan ini disampaikan, semoga dapat diterima dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Pangkalpinang, 14 Desember 2023  
PLBH LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG

  
**APRIANGGARA, S.H.**  
(Ketua umum)

LBH LEGAL JUSTICE BABEL  
Jl. BETUTU RT.002 RW.001 KEL.Selindung-Baru Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang,  
Prov. Kep. Bangka Belitung



**PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG**

**Jl. Betutu Raya Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Email : [legaljusticebabel@gmail.com](mailto:legaljusticebabel@gmail.com), Hp/WA : 082377222193**

Pangkalpinang, 14 Desember 2023

Nomor : 01/P/PLBHLEGALJUSTICEBABEL/XII/2023  
Lampiran : Dokumen Penawaran

Kepada Yth.:  
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang  
Cq. Pejabat Pengadaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang  
Di -  
Pangkalpinang

**Perihal : Penawaran Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum  
Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024**

Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami dari "Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung" mengajukan penawaran untuk pekerjaan Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.


Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai bulan Januari sampai dengan Desember, dengan rincian setiap hari kerja : Hari Senin s/d Jumat (Sesuai Jam Layanan pada Pengadaan Jasa Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang).

Surat permohonan Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy dari aslinya.

Dengan disampaikannya Surat permohonan Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Demikian permohonan ini disampaikan, semoga dapat diterima dan atas kerja samanya disampaikan terimakasih.

Pangkalpinang, 14 Desember 2023  
PLBH LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG

  
**APRI ANGGARA, S.H.**  
(Ketua umum)

LBH LEGAL JUSTICE BABEL  
Jl. BETUTU RT.002 RW.001 KEL.Selindung Baru Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang,  
Prov. Kep. Bangka Belitung

PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

NIK : 1703012204920002

Nama : APRI ANGGARA  
Tempat/Tgl Lahir : SERDANG, 22-04-1992  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B  
Alamat : GG.PUCUK II  
RT/RW : 002/000  
Kel/Desa : AJR MESU  
Kecamatan : PANGKALAN BARU  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BANGKA TENGAH  
03-08-2023





PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG  
KECAMATAN GABEK  
**KELURAHAN SELINDUNG BARU**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kota Pangkalpinang 33117

SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA

Nomor : 006 / KEL.SBR / V / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Selindung Baru Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Penanggung Jawab : **APRI ANGGARA**

Tempat/Tanggal Lahir : Serdang, 22 – 04 - 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama/Kewarganegaraan : Islam / Indonesia

N I K : 1903012204920002

Benar pada saat ini membuka/mempunyai-Kantor sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama Lembaga : **PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
LEGAL JUSTICE**

Jenis/Bidang : **BANGKA BELITUNG**

Alamat Kantor : Jasa Hukum  
: Jl.Betutu RT/RW 002/001 Kelurahan Selindung Baru  
Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang

Status Bangunan : Milik Sendiri / Pribadi

Akta Pendirian : Notaris : **DITA RAHMASARI,S.H.,M.Kn**  
: tanggal 24 Januari 2023 nomor 06.-

Jumlah Karyawan : 3 (Tiga) Orang

Demikian Surat Keterangan Domisili Lembaga ini dibuat untuk di digunakan sebagaimana mestinya.

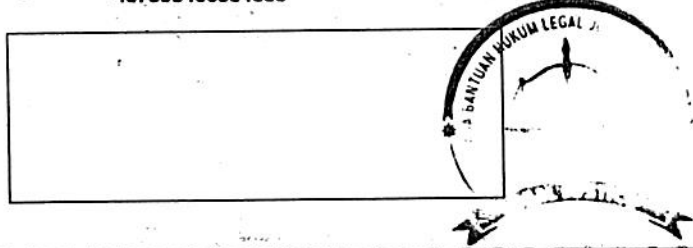
Pangkalpinang, 02 Mei 2023

Lurah Selindung Baru,

  
TEGUH ARIFIANTO, S.I.Kom  
NIP. 196612292010011010

Kantor BANK BRI 0063 CABANG PANGKAL PINANG CIF : PKY1738

No. Rekening 0063-01-027596-53-3 Tanggal : 09-08-2023  
Nama PLBH LEGAL JUSTICE BABEL  
Alamat JL BETUTU KEL SELINDUNG BARU KEC GABUN PANGKAL PINANG  
Tanda Pengenal KTP: 407395466304005



Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI

**PANGKAL PINANG**

Dipangkalpinang,

**BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**



Pejabat Bank



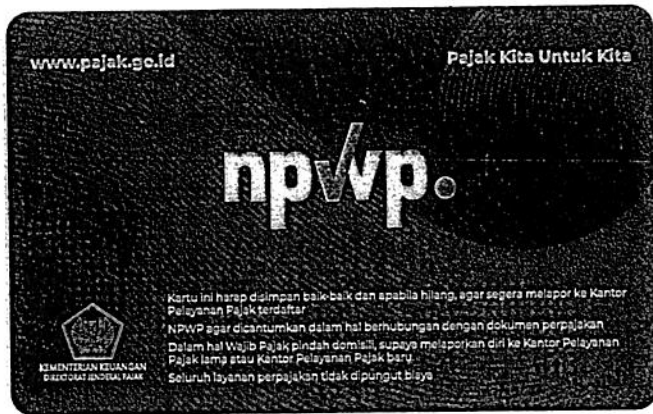
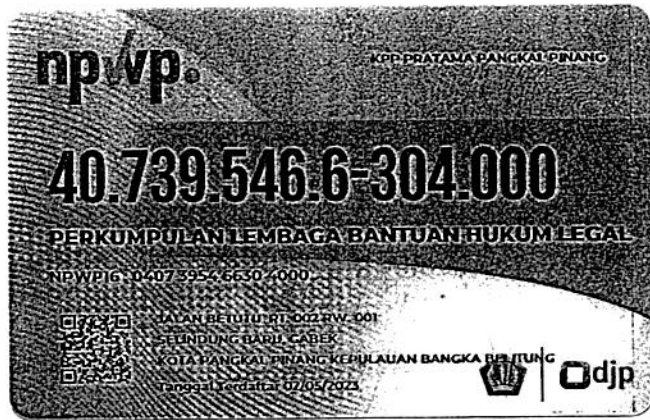
**PANGKAL PINANG**

1. Penarikan saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank BRI. Buku tabungan ini harus diserahkan kepada yang berwajib.
2. Penarikan tunai yang diwakilkan, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja Pembuka Rekening).
3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan identitas diri lainnya yang masih berlaku.
4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini.
5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank lain.

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo\_BRI

AXI-08-19

No. Seri : 02923221





**DITA RAHMASARI, S.H., M.Kn**  
**NOTARIS/PPAT**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI  
Nomor : AHU-0434-AH.02.01-Th 2010 Tanggal 28 Januari 2010  
SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
Nomor : 2/KEP-17.3/I/2015 Tanggal 08 Januari 2015

**SALINAN**

**A K T A**

**ANGGARAN DASAR**

**PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICE**

**BANGKA BELITUNG**

**TANGGAL 24 Januari 2023..... NOMOR 06.-.....**

**Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 5 Kelurahan Rawa Bangun  
Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung  
Telp./Fax. (0717) 435889, Fax (0717) 439131, HP. 0812 7836918  
Email : ditarahmasari@yahoo.com**

ANGGARAN DASARPERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICEBANGKA BELITUNG

Nomor : 06.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh empat Januari ---  
 tahun duaribu duapuluh tiga (24-01-2023). -----  
 Pukul, 17:00 (tujuhbelas) -----  
 (Waktu Indonesia Barat). -----  
 Berhadapan dengan saya, DITA RAHMASARI, Sarjana Hukum, --  
 Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Pangkalpinang ----  
 dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal  
 dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan APRI ANGGARA, Lahir di Serdang, pada tanggal ----  
 duapuluh dua April tahun seribu sembilanratus -----  
 sembilanpuluh dua (22-04-1992), Warga Negara Indonesia,  
 Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, -  
 Jalan Betutu, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, ---  
 Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, -----  
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----  
 Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1903012204920002, ---  
 yang masa berlakunya seumur hidup. -----
2. Tuan YULY PRASETIA UTOMO, Lahir di Penyamun, pada ----  
 tanggal tigabelas Juli tahun seribu sembilanratus ----  
 sembilanpuluh dua (13-07-1992); Warga Negara -----  
 Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----  
 Kabupaten Bangka, Desa Penyamun, Rukun Tetangga 003, -  
 Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, -----  
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----  
 Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1901051007920001, ---  
 yang masa berlakunya seumur hidup. -----  
 Pada saat sekarang berada di Kota Pangkalpinang. -----





----- MUKADIMAH (PEMBUKAAN) -----

PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICE -----

BANGKA BELITUNG adalah Lembaga yang dibentuk untuk -----  
 memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada -----  
 masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum yang dilakukan  
 dalam kerangka usaha dan tujuan, seperti : -----

- (a) Menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai objek -  
 hukum. -----
- (b) Penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi ----  
 manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya Negara ----  
 hukum. Sifat bantuan hukum yang diusung adalah -----  
 bantuan hukum konstitusional, dimana bantuan hukum --  
 diberikan tidak saja secara individual akan tetapi --  
 juga kepada kelompok masyarakat secara kolektif. ----

PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICE -----

BANGKA BELITUNG didirikan mengingat banyaknya -----  
 masyarakat yang kurang memahami akan perkembangan -----  
 dalam proses permasalahan hukum yang di hadapinya -----  
 khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu -----  
 untuk berkonsultasi tentang permasalahan hukum yang -----  
 sedang di hadapi oleh karena itu PERKUMPULAN LEMBAGA -----  
 BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG berdiri -----  
 untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat -----  
 miskin secara cuma-cuma, dengan harapan PERKUMPULAN -----  
 LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG -----  
 dapat memberikan bantuan hukum dan dapat menjadi -----  
 lembaga yang mandiri, independent dan sepenuhnya -----  
 milik masyarakat Bangka Belitung, hal ini dapat -----  
 terwujud dengan partisipasi serta dukungan dari -----  
 seluruh masyarakat. -----

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ----



LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG yang menjalankan -----  
kegiatan bantuan hukum yang mandiri, independent dan -  
sepenuhnya milik masyarakat rakyat Bangka Belitung. --

2. Memberikan akses keadilan kepada masyarakat miskin dan  
kurang mampu. -----

----- F U N G S I -----

----- Pasal 3 -----

Fungsi Perkumpulan yaitu : -----  
Memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang -----  
tersangkut permasalahan hukum baik di tingkat -----  
penyidikan, penyelidikan, penuntutan, persidangan, -----  
dan segala kegiatan di pengadilan pada semua -----  
tingkatan. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 4 -----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari-  
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari : -----  
Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh -----  
juta rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --  
kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari :-----
  - a. Iuran anggota ; -----
  - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
  - c. Wakaf;-----
  - d. Hibah, Hibah wasiat; dan -----
  - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----  
Anggaran Dasar Perkumpulan dan atau peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Semua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan untuk --  
mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.-----

----- ORGAN PERKUMPULAN -----



4. Anggota Perkumpulan mempunyai kewajiban untuk ikut --- aktif melaksanakan program kerja Perkumpulan ini dan --- memberikan dukungan positif agar maksud dan tujuan --- perkumpulan tercapai. -----
5. Anggota Perkumpulan mempunyai kewajiban moral ----- terhadap nama baik perkumpulan. -----
6. Anggota Perkumpulan dapat berhenti karena alasan ----- sebagai berikut : -----
  1. Permintaan sendiri secara tertulis. -----
  2. Sakit sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya. -----
  3. Meninggal dunia. -----
  4. Pindah dan atau tidak diketahui alamatnya. -----
  5. Anggota Perkumpulan dapat diberhentikan sementara --- dari keanggotaannya atas pertimbangan Pengurus. ---
  6. Dalam hal Anggota Perkumpulan berhenti, maka ----- lowongan tersebut harus diisi paling lambat dalam --- waktu 3 (tiga) bulan. -----
  7. Diatur dibawah Pengampuan (onder curatele gesteld). -----
  8. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 8 -----

1. Pemilihan Pengurus. -----
  1. Pengurus Perkumpulan dipilih dari Anggota ----- Perkumpulan yang sedikit-dikitnya selama 2 (dua) --- tahun telah menjadi anggota dan terdiri atas ----- sekurang-kurangnya, sebagai berikut : -----
    - a. Ketua; -----
    - b. Sekretaris; -----
    - c. Bendahara; -----
  2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, --- maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai --



- Rumah Tangga. -----
4. Mengatur urusan umum dan melaksanakan keputusan-----  
keputusan Rapat Umum Anggota (RUA). -----
  5. bertanggung jawab kepada Rapat Umum Anggota (RUA) -  
atas segala pekerjaan yang menjadi kewajibannya. --
  6. selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir ---  
tahun kalender yang juga menjadi tahun buku -----  
Perkumpulan, Ketua Perkumpulan wajib memberikan ---  
pertanggungjawaban dari tahun yang lalu kepada Rapat  
Umum Anggota (RUA). -----
2. Pengurus Perkumpulan berhak : -----  
Melakukan segala tindakan baik yang merupakan -----  
kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan ---  
pembatasan untuk : -----
    - a. Membuat pinjaman uang guna atas tanggungan -----  
perkumpulan atau meminjamkan uang perkumpulan ----  
kepada pihak lain. -----
    - b. Membeli, menjual atau dengan jalan mendapatkan, ---  
melepaskan hak atas atau memberatkan barang-barang-  
yang tidak bergerak, termasuk bangunan dan hak-hak-  
atas tanah. -----
    - c. Mengikat perkumpulan sebagai penanggung/penjamin. -
    - d. Menggadaikan barang-barang bergerak milik -----  
Perkumpulan. -----
    - e. Mengubah atau mengganti status kepemilikan -----  
perkumpulan. -----
- Harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari-  
Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB). -----
3. Ketua dan sekretaris berhak mewakili Perkumpulan -----  
didalam dan diluar pengadilan dan karena itu berhak --  
melakukan tindakan sebagaimana disebut dalam pasal 9 -



- jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak --  
terjadinya kekosongan tersebut, Pengurus harus -----  
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru-  
dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus.-
8. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, ---  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----  
maksudnya tersebut kepada Pengurus paling lambat 30 --  
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----  
dirinya. -----
  9. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Perkumpulan, -  
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)-  
hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian ---  
Pengawas Perkumpulan, Anggota Perkumpulan wajib -----  
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
dan instansi terkait.-----
  10. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau -  
Pelaksana Kegiatan.-----
  11. Jabatan Pengawas berakhir apabila :-----
    - a. Meninggal dunia.-----
    - b. Mengundurkan diri.-----
    - c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----  
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman ----  
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.-----
    - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----  
Anggota (RUA). -----
    - e. Masa jabatan berakhir.-----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

##### ----- Pasal 11 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung -  
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan -



- (7), Anggota Perkumpulan dengan keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) wajib :
- a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau
  - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Anggota Perkumpulan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Perkumpulan.

#### RAPAT PENGAWAS

#### Pasal 12

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Umum Anggota Perkumpulan.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Umum Anggota Perkumpulan.

- musyawarah untuk mufakat.-----
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
 mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----  
 berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)  
 jumlah suara yang sah.-----
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----  
 banyaknya, maka usul difolak.-----
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-  
 surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ---  
 pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----  
 secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain --  
 dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
- 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung-  
 dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- 6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang -  
 ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang ---  
 anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat ----  
 sebagai sekretaris rapat.-----
- 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak ---  
 disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan -  
 akta Notaris.-----
- 8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa  
 mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua ----  
 Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua --  
 Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang ---  
 diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul --  
 tersebut.-----
- 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat  
 (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---  
 yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

----- RAPAT -----

Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan -----

Perkumpulan tahun lalu yang telah diaudit. ----

6. Rapat Umum Anggota (RUA) Tahunan harus -----  
dibuatkan notulen yang wajib ditandatangani ---  
oleh ketua rapat dan sekretaris, kecuali -----  
notulen dibuat dihadapan Notaris. -----

2. Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB). -----

1. Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) dilakukan  
untuk : -----

1. Memilih dan mengangkat Pengurus dan Anggota-  
Biasa Perkumpulan. -----

2. Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) -----  
untuk tahun buku berikutnya. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah ----  
Tangga. -----

4. Pembubaran Perkumpulan. -----

5. Hak-hal yang mendesak lainnya. -----

2. Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) dapat ---  
diselenggarakan setiap waktu atas permintaan --  
Pengurus Perkumpulan atau sedikitnya  $1/2+1$  ----  
(satu per dua plus satu) orang dari antara ----  
anggota Pengurus Perkumpulan. -----

3. Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) dapat ---  
diselenggarakan apabila tercapai kuorum yakni -  
lebih dari  $2/3$  (dua per tiga) jumlah anggota --  
perkumpulan, jika kuorum tidak tercapai, maka -  
dilakukan panggilan kedua dalam jangka waktu 6-  
(enam) hari dengan syarat-syarat yang sama ----  
dengan rapat pertama, jika kuorum tidak -----  
tercapai juga maka rapat kedua ini dianggap sah  
tanpa memperhatikan kuorum. -----

yang dikeluarkan dengan sah, setiap anggota -----  
 perkumpulan berhak mengemukakan 1 (satu) suara. --  
 Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju ---  
 sama banyaknya, maka keputusan diambil berdasarkan  
 keputusan ketua rapat. -----

5. Rapat Pengurus harus dibuatkan notulen yang wajib-  
 ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris, --  
 kecuali notulen dibuat dihadapan Notaris. -----

----- TAHUN BUKU PERKUMPULAN -----

----- Pasal 16 -----

Tahun buku perkumpulan dimulai tanggal 1 (satu) Januari -  
 dan berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember --  
 setiap tahun. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 17 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan ----  
 berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota (RUA), yang -  
 dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah  
 Anggota. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----  
 mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
 mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan ----  
 berdasarkan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per --  
 tiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir atau yang  
 diwakili.-----
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -  
 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat -----  
 Umum Anggota yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari ---  
 terhitung sejak tanggal Rapat Umum Anggota (RUA) yang-  
 pertama.-----

Pengurus kepada Rapat Umum Anggota Perkumpulan.-----

----- Pasal 20 -----

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan - yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Rapat Umum Anggota Perkumpulan dan ---- disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari --- seluruh jumlah anggota Rapat Umum Anggota Perkumpulan yang hadir.-----
2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan ---- menggabungkan diri dan akan menerima penggabungan ---- menyusun usul rencana penggabungan.-----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam - ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan- oleh Pengurus dari Perkumpulan yang akan menggabungkan diri yang akan menerima penggabungan.-----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Anggota Perkumpulan masing-masing ---- Perkumpulan.-----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ----- dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat ----- dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----
6. Pengurus Perkumpulan hasil Penggabungan wajib ----- Mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar ---- harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga ---- puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai ---- dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan ---- perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan - Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----  
diserahkan kepada Perkumpulan lain atau kepada badan -  
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan ---  
ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara -  
dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan -  
tujuan Perkumpulan yang bubar.-----

----- PENUTUP -----

----- Pasal 23 -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur -----  
dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan -----  
peraturan-peraturan lain yang disebutkan dalam -----  
Anggaran Dasar ini, akan diatur dan ditetapkan oleh -----  
Rapat Umum Anggota (RUA). -----

Anggota Perkumpulan untuk pertama kali adalah :-----

1. Tuan APRI ANGGARA, Lahir di Serdang, pada tanggal ----  
duapuluh dua April tahun seribu sembilanratus -----  
sembilapuluh dua (22-04-1992), Warga Negara Indonesia,  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, -  
Jalan Betutu, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, ---  
Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1903012204920002, ---  
yang masa berlakunya seumur hidup. -----
2. Tuan YULY PRASETIA UTOMO, Lahir di Penyamun, pada ---  
tanggal tigabelas Juli tahun seribu sembilanratus ----  
sembilanpuluh dua (13-07-1992), Warga Negara -----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Bangka, Desa Penyamun, Rukun Tetangga 003, -  
Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1901051007920001, ---

Ketua Umum

: Tuan APRI ANGGARA, Lahir di Serdang, -  
pada tanggal duapuluh dua April tahun  
seribu sembilanratus sembilapuluh dua  
(22-04-1992), Warga Negara Indonesia,  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota  
Pangkalpinang, Jalan Betutu, Rukun --  
Tetangga 002, Rukun Warga 001, -----  
Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan -  
Gabek, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Republik Indonesia Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) : -----  
1903012204920002, yang masa -----  
berlakunya seumur hidup. -----

Ketua

: Tuan YULY PRASETIA UTOMO, Lahir di --  
Penyamun, pada tanggal tigabelas Juli  
tahun seribu sembilanratus -----  
sembilanpuluh dua (13-07-1992),. Warga  
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, --  
bertempat tinggal di Kabupaten -----  
Bangka, Desa Penyamun, Rukun Tetangga  
003, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Republik Indonesia Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) : -----  
1901051007920001, yang masa -----  
berlakunya seumur hidup. -----

Sekretaris

: Nona SOFIE ANANDA, Lahir di -----  
Sungailiat, pada tanggal dua Januari-  
tahun duaribu satu (02-01-2001), ----  
Warga Negara Indonesia, -----

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di  
 Kota Tangerang, A5/15, Rukun Tetangga  
 007, Rukun Warga 032, Kelurahan ----  
 Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua.-  
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
 Republik Indonesia Nomor Induk -----  
 Kependudukan (NIK) : -----  
 3603280508730004, yang masa -----  
 berlakunya seumur hidup. -----

----- PASAL 24 -----

Para Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya -----  
 tersebut di atas menyatakan pula hal-hal sebagai -----  
 berikut: -----

- Menjamin akan kebenaran atas surat-surat, -----  
 sebagaimana disebut dalam akta ini, identitas para ----  
 pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada ---  
 saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas --  
 hal-hal tersebut, dan;-----  
 telah mengerti serta memahami isi akta ini.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kota -----  
 Pangkalpinang, pada hari, tanggal, bulan dan -----  
 tahun yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan ----  
 dihadiri oleh : -----

1. Tuan WIWIN RIA, Lahir di Pangkalpinang, pada tanggal -  
 duapuluh satu September tahun seribu sembilanratus ---  
 tujuh puluh enam (21-09-1976), Warga Negara Indonesia,  
 bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, -----  
 Jalan Sahabat, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, --  
 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Tamansari. -----  
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0000561.AH.01.07.TAHUN 2023  
- TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG**

**1. Susunan Organ Perkumpulan**

| NAMA                | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>PERKUMPULAN | JABATAN    |
|---------------------|--------------------|----------------------|------------|
| APRI ANGGARA        | 1903012204920002   | PENGURUS             | KETUA UMUM |
| YULY PRASETIA UTOMO | 1901051007920001   | PENGURUS             | KETUA      |
| SOFIE ANANDA        | 1901054201010004   | PENGURUS             | SEKRETARIS |
| ARI ADITIA PANGESTU | 1903030410950001   | PENGURUS             | BENDAHARA  |
| HAZMI, SE.MM.       | 3603280508730004   | PENGAWAS             | KETUA      |



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Januari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Februari 2023

SK ini dicetak dari  
Sistem Administrasi Badan Hukum  
Negeri Kota Pangkalpinang



(DITA RAHMANSARI, SH.M.Kn)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0000561.AH.01.07.TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DITA RAHMASARI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 06 Tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh DITA RAHMASARI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG tanggal 25 Januari 2023 dengan Nomor Pendaftaran 6023012519101618 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG  
Berkedudukan di KOTA PANGKAL PINANG, sesuai salinan Akta Nomor 06 Tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh DITA RAHMASARI, S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA PANGKAL PINANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Januari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

SK ini dicetak dari  
Sistem Administrasi Badan Hukum  
Notaris Kota Pangkalpinang

(DITA RAHMASARI, S.H., M.Kn)





DICETAK PADA TANGGAL 01 Februari 2023



**JADWAL PENUGASAN STAF ADMINISTRASI**

| No        | Nama Personil   | Masukan Nama Personil<br>(Terhitung Bulan sejak Penugasan) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Bulan |
|-----------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|
|           |   | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |       |
| 1         | INNEKE LARAS AMBARSARI, S.H<br>(Staf Administrasi)          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 12    |
| 2         | ANNISA ARROHMAH<br>(Mahasiswa Hukum)<br>(Staf Administrasi) |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 12    |
| 3         | ARI ADITIA PANGESTU, S.H<br>(Staf Administrasi & advokat)   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 12    |
| Sub total |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |
| No        | Nama Personil   | Masukan Nama Personil<br>(dihitung bulan sejak penugasan)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Bulan |
|           |   | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |       |
| Asing     |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |
|           |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |

Keterangan :

|   |               |
|---|---------------|
|   | = Penuh Waktu |
|  | = Paruh Waktu |

Pangkalpinang, 14 Desember 2023

**PLBH LEGAL JUSTICE BABEL**





**APRI ANGGARA, S.H.**  
(Ketua Umum)

**JADWAL PENUGASAN ADVOKAT**

| No        | Nama Personil                         | Masukan Nama Personil<br>(Terhitung Bulan sejak Penugasan) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Bulan |
|-----------|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|
|           |                                       | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |       |
| 1         | APRI ANGGARA, S.H<br>(Advokat)        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 12    |
| 2         | FENTI, S.H.<br>(Advokat)              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 12    |
| 3         | ARI ADITIA PANGESTU, S.H<br>(Advokat) |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 12    |
| Sub total |                                       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |
| No        | Nama Personil                         | Masukan Nama Personil<br>(dihitung bulan sejak penugasan)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Bulan |
|           |                                       | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |       |
| Asing     |                                       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |
|           |                                       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |

Keterangan :

-  = Penuh Waktu
-  = Paruh Waktu

Pangkalpinang, 14 Desember 2023

PLBH LEGAL JUSTICE BABEL

  
**APRI ANGGARA S.H.**  
 (Ketua Umum)

**KOMPOSISI TIM PENUGASAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG  
(DAFTAR PERSONIL)**

| No | Nama Personil                                       | Lembaga                  | Tenaga Ahli Lokal/Asing | Lingkup Keahlian              | Posisi Diusulkan                          | Uraian Pekerjaan  | Jumlah Orang Bulan |
|----|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------|
| 1. | Apri Anggara, S.H.<br>(Advokat)                     | PLBH LEGAL JUSTICE BABEL | LOKAL                   | Litigasi dan Non Litigasi     | Ketua Umum/Tenaga Ahli/Advokat Pendamping | Pendamping Perkara dan Konsultasi                               | 12                 |
| 2. | FENTI, S.H<br>(Advokat)                             | PLBH LEGAL JUSTICE BABEL | LOKAL                   | Litigasi dan Non Litigasi     | Tenaga Ahli/Advokat Pendamping            | Pendamping Perkara dan Konsultasi                               | 12                 |
| 3. | Ari Aditia Pangestu, S.H.<br>(Advokat)              | PLBH LEGAL JUSTICE BABEL | LOKAL                   | Litigasi dan Non Litigasi     | Bendahara /Tenaga Ahli/Advokat Pendamping | Pendamping Perkara dan Konsultasi                               | 12                 |
| 4. | Inneke Laras Ambarsari, S.H.<br>(Staf Administrasi) | PLBH LEGAL JUSTICE BABEL | LOKAL                   | Non Litigasi dan Administrasi | Staf Administrasi                         | Bagian Konsultasi Advis dan Pembuatan Surat Permohonan/ Gugatan | 12                 |
| 5. | Annisa Arrohmah (Mahasiswa) Staf Administrasi)      | PLBH LEGAL JUSTICE BABEL | LOKAL                   | Non Litigasi dan Administrasi | Staf Administrasi                         | Bagian Konsultasi Advis dan Pembuatan Surat Permohonan/ Gugatan | 12                 |

Pangkalpinang, 14 Desember 2023

PLBH LEGAL JUSTICE BABEL



**JADWAL PELAKSANA RENCANA PEKERJAAN**

| No | Kegiatan  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu  | Sep | Okt | Nov | Des | Keterangan  |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|
|    |   | I   | II  | III | IV  | V   | VI  | VII | VIII | IX  | X   | XI  | XII |   |
| 1  | Pelayanan<br>❖ Konsultasi<br>❖ Advis<br>❖ Pendampingan<br>❖ Pembuatan Surat Gugatan<br>❖ Pembuatan Surat Permohonan |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | - Sesuai dengan Jam kerja Pengadil an.  |
| 2  | Pelaporan Pendahuluan   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | Disampaik an pada awal penugasan paling lambat 3 hari setelah diterbitkan SPMK          |
| 3  | Pelaporan Berkala   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | Setiap Akhir Periode bulan pelayanan  |
| 4  | Pelaporan Akhir   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | Dilaksanak an di masa akhir periode tugas paling lambat 7 hari setelah berakhir kontrak |

Keterangan



= Jadwal Kerja

= Off/belum ada/tidak ada jadwal

Tambahan :

Untuk jadwal kerja yang belum diagendakan akan diatur kemudian dan jika ada penambahan pekerjaan diluar kontrak kerja dengan harga satuan, maka akan diatur lebih lanjut.

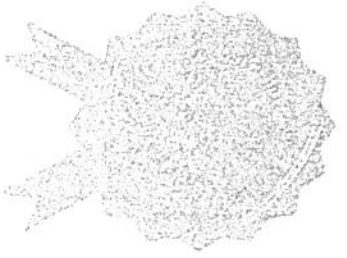
Pangkalpinang, 14 Desember 2023

PLBH LEGAL JUSTICE BABEL

APRI ANGGARA, S.H.  
(Ketua umum)



# SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PERTIBA PANGKALPINANG



Memberikan kepada : Inneke Laras Ambarsari  
Tempat dan tanggal lahir : Semulut, 27 April 2000  
Nomor Pokok Mahasiswa : 18.01.0008-III  
Jurusan / Bidang Studi : Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tanggal Kelulusan : 18 Juni 2022  
Status : Terakreditasi B berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 193/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2018  
Tanggal 9 Januari 2018 dan Sertifikat No. 023629

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepedanya diimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar akademik Sarjana Hukum

Pembantu Ketua I  
Bidang Akademik Dan Riset

Syafiq Hariansah, S.H., M.H.

NIDN: 0209118802



Dr. H. Yandi, S.H., M.H.

NIDN: 0202106701

Pangkalpinang, 25 Juli 2022  
Ketua,

PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG  
KOTA PANGKAL PINANG

NIK : 19050362040000002

Nama : INNEKE LARAS AMBARSAARI  
Tempat/Tgl Lahir : SEMBUT, 27-04-2000  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : \*  
Alamat : JL. PE. MARTADINATA  
RT/RW : 008/002  
Kel/Desa : OPAS INDAH  
Kecamatan : TAMAN SARI  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: BELUM KAWIN  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA PANGKAL  
PINANG

23-11-2022

*Inneke Laras AmbarSari*  
A

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

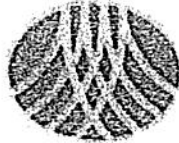
NIK = 1903015701030002

Nama ANNISAARROHMAH  
Tempat/Tgl Lahir JERJI, 17-01-2003  
Jenis Kelamin PEREMPUAN Gol. Darah  
Alamat DESA JERJI  
RT/RW 004/002  
Kel/Desa JERJI  
Kecamatan TOBOALI  
Agama ISLAM  
Status Perkawinan BELUM KAWIN  
Pekerjaan BELUM/TIDAK BEKERJA  
Kewarganegaraan WNI  
Berlaku Hingga SEUMUR HIDUP



BANGKA SELATAN  
25-11-2020

*Annisa*



**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**DEWAN PIMPINAN CABANG PANGKALPINANG-BABEL  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA**

Office : Jl. Raya Perum Loya Sutra No. 01 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten  
Bangka-Babel 33215, Tlp/HP : 0717-93935 / 081296541980

Kepada Yth.  
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Peradi  
Di Tempat.

Nomor : 56/DPC PERADI/PANGKALPINANG/VI/2022  
Hal : Rekomendasi Perubahan Nama dalam KTPA

**SURAT REKOMENDASI**

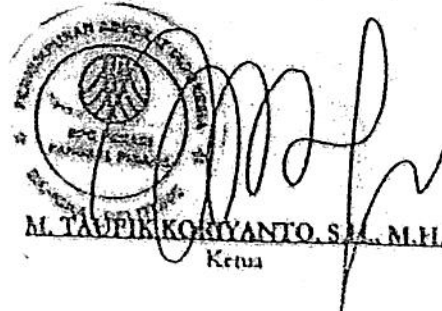
Sehubungan dengan adanya surat permohonan perubahan nama dari rekan APRI, S.H. menjadi APRI ANGGARA, S.H. di dalam kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dengan surat Tanggal 13 Mei 2022, maka Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Pangkalpinang Babel (DPC PERADI PKP BABEL) dengan ini merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Nasional PERADI untuk membantu proses penerbitan Kartu Tanda Pengenal Advokat a.n. :

Nama : APRI, S.H. menjadi (APRI ANGGARA, S.H.)  
Nomor Induk Advokat (NIA) : 17.02888

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 20 Juni 2022

**DEWAN PIMPINAN CABANG  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
PANGKALPINANG-BABEL**

  
M. TAUFIK KORYANTO, S.H., M.H.  
Ketua

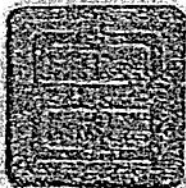
Terselasaan

Asap/ldc



**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

Apri, S.H.



No. 17.02886

Perwakilan Pinang

0812-31-12-2024

**KTPA**  
Kantor Tanah Pengenal Advokat

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia

  
 Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H.  
Ketua Umum



  
 H. Hermansyah Djalim, S.H., M.H.  
Sekretaris Jenderal

Grand Mall Tower II, Jl. S. Parman Kav. 72-24 Jakarta Barat 11481 | +62 21 2925 2303 E info@peradi.or.id

## BERITA ACARA SUMPAAH

Pada hari ini KAMIS tanggal 04 JANUARI tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS, Saya H. WIDIONO, S.H., M.B.A., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dengan ini disaksikan oleh Saudara:

1. H. AKSIR, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
2. RAMBANG SABARUDDIN ILYAS., S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Telah mengambil sumpah sebagai Advokat menurut agama yang dianut dari Saudara:

APRI, S.H.

Yang terdaftar dalam Buku Register Penyempahan Advokat Nomor : W7.U/003/HK.00/ADV/I/2018, tanggal 04 Januari 2018, dengan lafal sumpah telah diucapkan dihadapan kami, sebagai berikut:

### "DEMALLAH SAYA BERSUMPAAH":


- Bahwa saya, akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya, untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan, barang sesuatu kepada siapa pun juga;
- Bahwa saya, dalam melaksanakan tugas profesi, sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- Bahwa saya, dalam melaksanakan tugas profesi, di dalam atau di luar pengadilan, tidak akan memberikan, atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya, agar memenangkan atau menguntungkan, bagi perkara klien yang sedang, atau akan saya tangani;
- Bahwa saya, akan menjaga tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya, sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- Bahwa saya, tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan, atau memberi jasa hukum, di dalam suatu perkara, yang menurut hemat saya, merupakan bagian dari pada tanggung jawab profesi saya, sebagai seorang Advokat.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.


Yang Bersumpah,

  
APRI, S.H.


SAKSI I

  
H. AKSIR, S.H., M.H.  
NIP. 195907121986021002

Yang Mengambil Sumpah,  
KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

  
H. WIDIONO, S.H., M.B.A., M.H.  
NIP. 195111081984031001

SAKSI II

  
RAMBANG SABARUDDIN ILYAS, S.H., M.Hum.  
NIP. 195803271986031005



Ari Adhila Pangestu, S.H.



NIA: 22.04684  
DPC Pangkalpinang  
Berlaku s.d. 31-12-2024

[www.peradi.or.id](http://www.peradi.or.id)

**KTPA**  
Kartu Tanda Pengenal Advokat

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia

*Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H.*  
Ketua Umum

*H. Hermansyah Dukaalm, S.H., M.H.*  
Sekretaris Jenderal

Grand Silet Tower Lt.11, J. S. Pamanukaw, 22-24 Jakarta Barat 11480 T: +62 21 2925 2303 E: info@peradi.or.id

## BERITA ACARA SUMPAH

Pada hari ini Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023, Saya H. MAS HUSHENDAR, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dengan disaksikan oleh saudara :

1. YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
  2. JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
- Telah mengambil sumpah sebagai Advokat menurut agama yang dianut dari saudara :

### ARI ADITIA PANGESTU, S.H

Yang terdaftar dalam Buku Register Penyumpahan Advokat Nomor : W7.U/02/HK.04/ADV/1/2023, tanggal 10 Januari 2023,dengan lafal sumpah telah diucapkan dihadapan kami, sebagai berikut :

### "DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH"

- Bahwa saya, akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya, untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan, barang sesuatu kepada siapapun juga;
- Bahwa saya, dalam melaksanakan tugas profesi, sebagai pemberi jasa hukum, akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab, berdasarkan hukum dan keadilan;
- Bahwa saya, dalam melaksanakan tugas profesi, di dalam atau di luar pengadilan, tidak akan memberikan, atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya, agar memenangkan atau menguntungkan, bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;
- Bahwa saya, akan menjaga tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya, sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat;
- Bahwa saya, tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan, atau memberi jasa hukum, di dalam suatu perkara, yang menurut hemat saya, merupakan bagian dari tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat;

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

Yang bersumpah,



ARI ADITIA PANGESTU, S.H

Yang mengambil sumpah,



SAKSI I



YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H.,M.H  
NIP. 19670815 199212 2001

SAKSI II

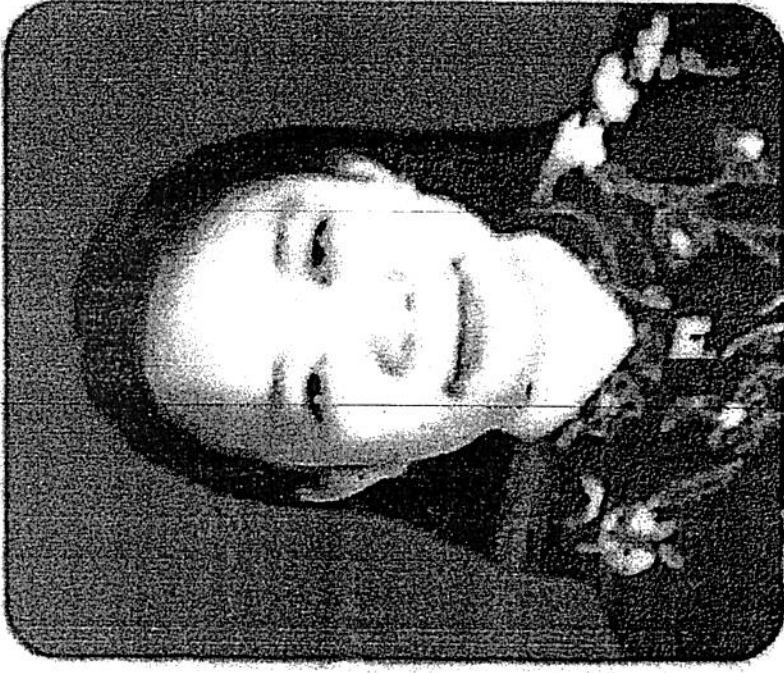


JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H.,M.H  
NIP. 19680329 199212 2001



**PERADI**  
PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**Fenti, S.H.**



**NIA: 17.02894**

**DPC Pangkal Pinang**

**Berlaku s.d.: 31-12-2024**

## BERITA ACARA SUMPAAH

Pada hari ini KAMIS tanggal 04 JANUARI tahun DUA RUBU DELAPAN BELAS, Saya H. WIDIONO., S.H., M.BA., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dengan ini disaksikan oleh Saudara:

1. H. AKSIR., S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
2. RAMBANG SABARUDDIN ILYAS., S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Telah mengambil sumpah sebagai Advokat menurut agama yang dianut dari Saudara:

FENTI, S.H.

Yang terdaftar dalam Buku Register Penyempahan Advokat Nomor : W7.U/009/HK.00/ADV/1/2018, tanggal 04 Januari 2018, dengan lafal sumpah telah diucapkan dihadapan kami, sebagai berikut:

"DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAAH":

- Bahwa saya, akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya, untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan, barang sesuatu kepada siapa pun juga;
- Bahwa saya, dalam melaksanakan tugas profesi, sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- Bahwa saya, dalam melaksanakan tugas profesi, di dalam atau di luar pengadilan, tidak akan memberikan, atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya, agar memenangkan atau menguntungkan, bagi perkara klien yang sedang, atau akan saya tangani;
- Bahwa saya, akan menjaga tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya, sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- Bahwa saya, tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan, atau memberi jasa hukum, di dalam suatu perkara, yang menurut hemat saya, merupakan bagian dari pada tanggung jawab profesi saya, sebagai seorang Advokat.

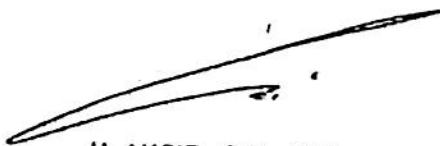
Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

Yang Bersumpah,




FENTI, S.H.

SAKSI I



H. AKSIR., S.H., M.H.  
NIP. 195907121986021002

Yang Mengambil Sumpah,  
KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG



H. WIDIONO., S.H., M.BA., M.H.  
NIP. 195111081984031001

SAKSI II



RAMBANG SABARUDDIN ILYAS., S.H., M.Hum.  
NIP. 195803271986031005